

# NASIONALISASI COPRAFONDS: HANCURNYA EKSPOR KOPRA DI INDONESIA BAGIAN TIMUR, 1940-1958

Oleh  
Dr. A. Rasyid Asba, MA<sup>1</sup>

Nasionalisasi perusahaan asing menjadi sistem ekonomi nasional tidak hanya mendorong munculnya diskontinuitas ekonomi “dari ekonomi kolonial ke ekonomi Indonesia modern”. Namun juga berdampak politis, yaitu mendorong munculnya konflik politik antara pemerintah pusat dengan kekuatan-kekuatan ekonomi di Indonesia bagian timur, bahkan membawa hancurnya komoditas ekspor kopra sebagai kekuatan ekonomi negara. Nasionalisasi Coprafonds menunjukkan bahwa sejak Pengakuan Kedaulatan tahun 1949, “nasibnya” mulai dipertanyakan sebagai lembaga kekuatan ekonomi regional di Indonesia bagian timur. Indonesia bagian timur sebagai pemasok kopra terbesar dunia tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya. Institusi ekonomi lokal hancur, esensitas integrasi perdagangan antar pulau menurun, penyelundupan kopra meningkat. Itulah sebabnya muncul konflik antara Pusat dan daerah seperti Pemberontakan Permesta. Makalah ini ingin menyoroiti awal mula terbentuknya struktur ekonomi regional melalui komoditas kopra, Coprafonds sebagai lembaga kekuatan ekonomi nasional, bagaimana Coprafonds sebagai lembaga ekonomi regional berubah menjadi isu politik dan dinasionalisasi menjadi Yayasan Kopra.

## A. Kopra Sebagai Kekuatan Ekonomi Indonesia Bagian Timur

Usaha Pemerintah Belanda untuk membangun Makassar sebagai pusat perdagangan di Asia Pasifik, tampaknya bukan hanya pertimbangan ekonomi semata, tetapi lebih bersifat politis global, yaitu munculnya persaingan ekonomi antara pemerintah Hindia Belanda dengan Pemerintah Inggris dalam menanamkan pengaruhnya di Hindia Timur. Hal itu ditunjukkan sejak awal, ketika Makassar ditetapkan sebagai pelabuhan bebas tahun 1847. Awal pertarungan kedua bangsa Eropa itu tidak hanya sampai masalah kebijakan penataan pelabuhan di daerah jajahan masing-masing, tetapi juga sampai perebutan komoditi kopra di Wilayah Timur Besar. Dalam mengimbangi Singapura Pemerintah Belanda tidak hanya membangun Makassar sebagai pelabuhan “enterpot” yang penting di luar Jawa, tetapi juga Makassar dijadikan sebagai pusat industri pabrik minyak kelapa melalui terbentuknya Oliefabrieken Insulinde Makassar (OFI. Makassar).. Kebijakan itu

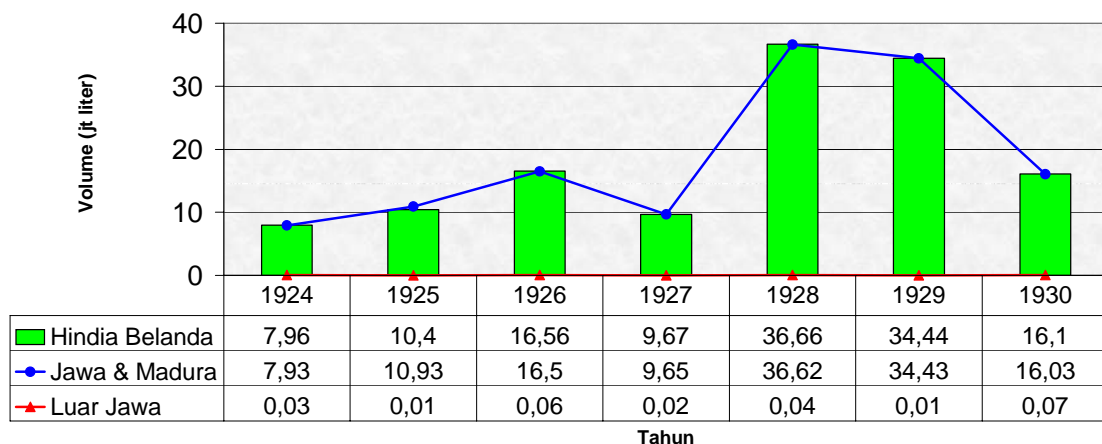
---

<sup>1</sup> Dr A. Rasyid Asba, MA. Dosen Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Univ. Hasanuddin Makassar dan Direktur Pusat Kajian Multikultural dan Pengembangan Regional Universitas Hasanuddin. Makalah ini disampaikan dalam Seminar Internasional “ Nasionalisasi dan Indonesianisasi Perusahaan Belanda di Indonesia”, pada tanggal 14 Agustus 2004 di Yogyakarta.

membuat Makassar semakin penting sebagai pusat niaga antar pulau di Wilayah Indonesia bagian timur. Melalui kebijakan tersebut Pemerintah Belanda berharap kopra tidak lagi diekspor ke Singapura, tetapi cukup hanya diolah di Makassar.

OFI Makassar didirikan pada tahun 1913. Ia merupakan bagian dari beberapa perusahaan minyak yang telah dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda. OFI Makassar adalah merupakan bagian dari Oliefabrieken Insulinde Hindia Belanda yang tersebar di Hindia Belanda sebelum Perang Dunia Pertama.<sup>2</sup> Perusahaan itu muncul di berbagai daerah di Hindia Belanda seperti Kediri, Sontono, Blitar, Tulung Agung, Banyuwangi, Kebumen, Rangkas Bitung, Bandung, Padang dan Makassar.<sup>3</sup> Setiap tahun Oliefabrieken Insulinde Hindia Belanda secara teratur mengekspor minyak kelapa ke luar negeri., misalnya dalam tahun 1924 jumlah ekspor minyak kelapa ke Eropa sekitar 7.96 juta liter, tahun 1925 menjadi 10,93 juta liter dan pada tahun 1928 meningkat menjadi 36.66 juta. liter, dan tahun 1930 turun menjadi 16.01 juta liter (grafik.1)

**Grafik 1**  
**Perkembangan ekspor Minyak Kelapa Periode Tahun 1924 -1930**



Sumber: Amsterdam, Gemeentearchief, Oliefabrieken Insulinde Makassar No.Inv. 590. Lihat pula R,N,J Kamerling. *De N.V. Olifabrieken Insulinde in Nederlands-Indie*,Uitgeverij T. Wever B.V. Franeker. 1982. hal, 65-71. lihat juga Mededeeling van het Centraal Kantoor voor de Statistiek, Afdelingen Landbouw en Handelsstatistiek, dalam *Economisch Weekblad* 14 April 1933, hal, 1700

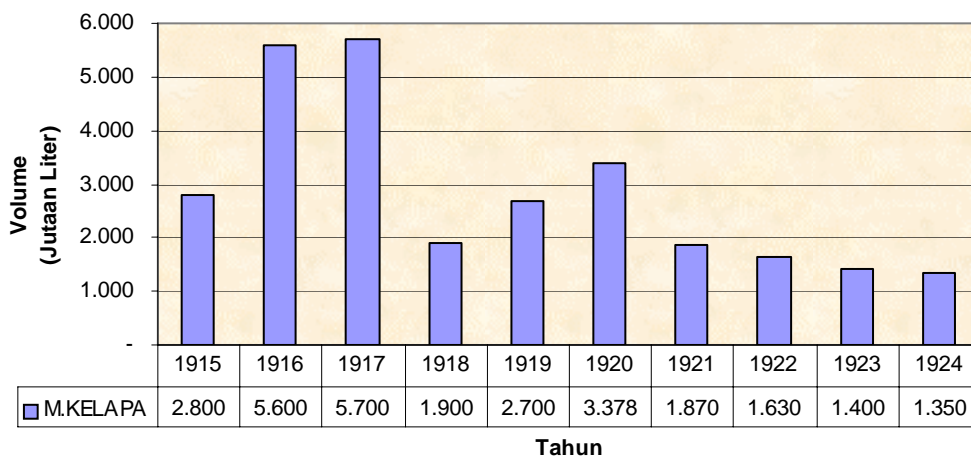
Meskipun pada umumnya minyak kelapa Hindia Belanda berasal dari Pulau Jawa, bukan berarti daerah-daerah luar Jawa tidak menghasilkan minyak kelapa.

<sup>2</sup> J. Th. Lindblad, "Business Strategies in Late Kolonial Indonesia" Dalam J.Th. Lindblad ed.*Historical Foundations of a National Economy in Indonesia, 1890s-1990s* Amsterdam: Royal Netherlands Academy Of Arts and Sciences, 1994. hal.209.

<sup>3</sup> Gemeentearchief Amasterdam, Oliefabrieken Insulinde Makassar No.Inv. 590. Lihat pula R,N,J Kamerling. *De N.V. Olifabrieken Insulinde in Nederlands-Indie*,Uitgeverij T. Wever B.V. Franeker. 1982. hal, 65-71

OFI. Makassar dalam tahun 1915 telah mengeskor minyak kelapa ke Amerika sebanyak 2,8 juta liter. Ekspor minyak kelapa Makassar ke Amerika. (grafik2):

**Grafik 2**  
**Ekspor Minyak Kelapa Makassar ke Amerika Pada Tahun 1915-1924**



**Sumber: AND, NHM Makassar tahun 1915-1924. No, Inv.5112. Lihat Juga Rapporten WGH. Ensenrin De Administrateur OFI. Makassar 1924, No. Inv. 590**

OFI. Makassar selain mengolah kopra menjadi minyak, juga membeli dan memasarkan kopra. Itulah sebabnya dalam tahun 1917 gudang penampungan kopra di perluas sampai di luar pelabuhan yaitu di Kampung "Maroangin" dekat Potere sekitar dua kilometer dari Pelabuhan Makassar. Ekspansi perluasan pergudangan kopra memberikan isyarat bahwa OFI Makassar terus berkembang. Perkembangan itu bukan hanya disebabkan karena minyak yang dihasilkan dari tahun ketahun terus meningkat tetapi juga karena OFI. Makassar memperluas usahanya sebagai eksportir kopra. Dalam pembelian kopra OFI. Makassar mendapat dukungan keredit dari Pemerintah Kolonial Belanda melalui Javasche Bank Cabang Makassar. Paling sedikit

setiap bulannya Javasche Bank mengeluarkan kredit f. 1.500.000, kepada para pengusaha yang bergiat di bidang perkopraan..<sup>4</sup>

Secara politis kehadiran OFI. Makassar adalah sangat menguntungkan, karena selain misinya sebagai lembaga ekonomi juga dapat mengimbangi laju pertumbuhan ekonomi Singapura, sehingga pedagang-pedagang Cina Makassar dapat meninggalkan kerediturnya di Singapura. Dengan demikian pedagang-pedagang Cina memudahkan diatur oleh OFI. Makassar. Keadaan itu membuat kedudukan Makassar menjadi pusat penggudangan kopra di Wilayah Timur Besar. Ia muncul sebagai induk berbagai perusahaan eksportir yang ada di Makassar. Para pedagang yang di bawah naungan OFI Makassar dapat mengekspor kopra, asalkan memakai merek "Kopra OFI Makassar". Untuk menampung beberapa ton kopra, pihak OFI Makassar menyediakan sarana penggudangan yang memadai. OFI. Makassar didukung oleh modal keuangan, yang dibekap oleh Javasche Bank. Hal itu merupakan keunggulan OFI Makassar bila dibandingkan dengan berbagai eksportir lainnya yang ada di Makassar. Selain itu kopra yang akan diekspor harus mendapat rekomendir dari OFI. Makassar.

Setiap bulannya OFI. Makassar membeli kopra dari berbagai daerah. Mereka membeli kopra baik melalui para pedagang maupun lewat perusahaan-perusahaan besar. Para pedagang itu, antara lain adalah : Sech bin Aoem Alamri, J. Caffin, Gebr. Mahieu, dari Gorontalo; Sie Ka The, Ong Soei Song, Thio Tjin Ton, E. Toemoando, Tjia Kae Tae dan Tjia Tjin Tai masing dari Menado; Badjamal dari Donggala; R.v. Duivenbods dari Ternate. Selain itu juga terdapat perusahaan seperti: H. Ensering, J. Jonquire, Dordtsche Patrolium Maatschappij dan Lindeteves-Stokokvis, KPM dari Makassar; J.M. chs. Nyland, G.C.T. van Dorp & Co, Becker & Co, Van Vliet & Zonnens, Eles & Co, H. Oving-Yzer Staathandel dan In t. Cred. & Hs. Ver: " Rotterdam" masing-masing dari Surabaya; Working & Co dari Bandung dan Moluksche Handelsvennootschap dari Ambon.<sup>5</sup>

Kehadiran pedagang-pedagang tersebut dapat membantu penduduk di Wilayah Indonesia bagian timur yang 60 % mata pencahariannya dari kopra. Para agen yang membeli kopra ini kebanyakan adalah penduduk pribumi dan Cina yang membuka gudang-gudang di setiap tempat, atau bahkan di bawah kolom rumah penduduk. Kebanyakan petani menjual kelapa tidak dalam bentuk kopra sehingga para pedagang-pedagang perantara membutuhkan waktu pengelolaan kelapa menjadi kopra. Di daerah Mandar hampir semua gudang-gudang kopra berada di sepanjang pantai diangkut melalui perahu dan kapal-kapal KPM.

Selain memberikan kontribusi secara langsung kepada penduduk pihak OFI. Makassar juga membantu merenovasi pelabuhan Makassar. Hampir semua keuntungannya masuk dalam kas keuangan pemerintah untuk perbaikan

---

<sup>4</sup> Gemeentearchief Amsterdam. Oliefabrieken Insulinde Makassar, no. Inv. 531

<sup>5</sup> Gemeentearchief Amsterdam . Oliefabrieken Insulinde Makassar, no. Inv.. 561, Lihat pula Verslag Nopens de Reis van de Directeur van Economic Zaken en de Hoofdspectur Hoofd van de Dienst van Scheepvaart naar Celebes en de Molukken in September 1938. hal,119-120

pelabuhan. Kuatnya campur tangan pemerintah mengendalikan keuangan OFI Makassar dapat mengganggu eksistensi pengembangan perusahaan. Akibatnya adalah OFI Makassar tidak mampu lagi merenovasi mesin-mesin pabriknya. Selain itu muncul persaingan yang tajam dari pabrik-pabrik minyak yang dikelola oleh pedagang Cina sampai terbentuknya Coprafonds.<sup>6</sup>

## B. Monopoli Coprafonds Dalam Perdagangan Kopra

*Coprafonds* dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 13 September 1940. Lembaga tersebut bertujuan mengatur pembelian, penggudangan dan penjualan kopra, sehingga harga kopra yang semakin merosot di pasaran akibat depresi ekonomi dapat ditanggulangi. Melalui cara itu pemerintah berharap agar kopra tetap eksis menjadi kekuatan ekonomi seperti ketika *Olifabrieken Insulinde* Hindia Belanda di tahun 1920-an. Berbagai langkah dilakukan, antara lain adalah menurunkan biaya pengangkutan dan membangun gudang-gudang penampungan kopra.<sup>7</sup>

Keterlibatan pemerintah secara langsung dalam tata-niaga kopra mengundang pertanyaan dari berbagai perusahaan dagang di Makassar, karena keterlibatan pemerintah itu dapat dianggap bertentangan dengan prinsip perdagangan bebas. Menurut Direktur Urusan Ekonomi Hindia Belanda G.H.C. Hart, keterlibatan langsung pemerintah mengatur perdagangan kopra hanya dilihat sebagai cara yang tidak bisa dihindari pada masa krisis. Kebijakan pemerintah tersebut bukanlah bertujuan menghalangi pasar bebas, tetapi menyelamatkan komoditi kopra yang harganya merosot tajam.<sup>8</sup>

Dalam bulan Nopember tahun 1940 muncul protes dari petani kelapa sebagai akibat terbentuknya *Coprafonds*.<sup>9</sup> Para petani tidak menerima kebijakan tersebut karena dapat mematikan kebebasan pasar. Hal itu didukung oleh anggota *Volksraad* melalui mosi tak percaya kepada pemerintah, dengan alasan *Coprafonds* dapat dianggap memonopoli pembelian kopra yang pada akhirnya juga turut merugikan petani kelapa. Mosi itu terdiri atas Muh. Yamin, Mogot Soekawati dan Muchtar Tadjuddin Noer. Selain tidak menginginkan adanya monopoli kopra juga mengusulkan agar pemerintah segera mencabut pengiriman kopra ke Jawa yang harganya dinilai terlalu rendah yaitu hanya f.2,50 perkwintal yang semestinya f 5 perkwintal. Mosi tak percaya tersebut tidak diterima karena setelah

---

<sup>6</sup> R.N.J. Kamerling RA. *De N.V. Oliefabrieken Insulinde in Nedrlands- Indie* Bedrijfvoering in het Onbekende Uitgeverij T. Wever B.V. Franeker. 1982. hal 65-85.

<sup>7</sup> *Pemberitaan Makassar*, Senin 25 September 1940.

<sup>8</sup> Ministerie Buitenlandse Zaken Archief, Den Haag "Copra en Coprafonds in Oost Indonesie. Dominerende positie van Copra in Oost-Indonesie". No, inv. 02024

<sup>9</sup> Ketika perang mulai redah, harga kopra di pasaran dunia kembali normal. *Coprafonds* yang tujuannya dibentuk untuk menyelamatkan harga kopra pada masa depresi tampil sebagai eksportir kopra yang besar. Lembaga tersebut dapat memperbaiki tata niaga kopra yang morat marit akibat perang. Kesuksesan yang diembannya sebagai lembaga tata-niaga kopra terus membaik. Selain pusatnya di Makassar, cabangnya tersebar di berbagai daerah di Indonesia seperti Manado, Gorontalo, Maluku Selatan, Kepulauan Sunda Kecil, Papua New Guinea dan Kalimantan Barat. Pada 1946, *Coprafonds* membuka 130 cabang dengan sekitar 1000 karyawan di seluruh Negara Indonesia Timur. Para karyawannya terdiri atas 873 orang Indonesia, 125 orang Cina, 47 orang Eropa, 16 orang Indo dan 9 orang Timur Asing

divoting dalam rapat Volksraad mendapat suara perbandingan 19:18, yaitu 19 suara menolak dan 18 suara yang mendukung.<sup>10</sup> Mosi tak percaya kepada pemerintah itu bertujuan untuk mewujudkan agar Coprafonds memperhatikan nasib petani kelapa, khususnya di Indonesia bagian timur.

Seusai perang Coprafonds mulai ditata ulang kembali tata-niaganya. Pada tahun 1946 sejumlah manager dikirim ke daerah-daerah untuk menyelidiki situasi kopra di Indonesia bagian timur. Mulailah dibenahi daerah-daerah produsen seperti perbaikan sarana komunikasi, penyediaan telegram dan sarana pengangkutan yang memadai.<sup>11</sup> Dalam bulan Mei, dibentuk tim pemantau kopra dengan tujuan menyelusuri pantai Sulawesi guna memberikan penyuluhan kepada para pedagang perantara (pa'palele) dan petani kelapa agar kopra kembali tetap dibangkitkan sebagai komoditi ekspor.<sup>12</sup> Tim itu bertugas selama sepuluh minggu. Mereka mengunjungi wilayah-wilayah penghasil kopra seperti di daerah Sangir, dan Morotai kepulauan Banggai, Kep. Selayar dan Maluku. Di wilayah tersebut dibagikan sejumlah tekstil, tas, tembakau, ikan kering dan uang. Tujuannya adalah untuk memberikan rangsangan penduduk agar para petani bergairah mengelola kopra

Setelah Tim Pemantau Kopra berhasil mengunjungi beberapa daerah pada bulan Agustus 1946, kopra mulai terkumpul di berbagai tempat. Sekitar 26 ribu ton kopra berhasil dikumpulkan di berbagai tempat seperti di Manado, Selayar dan Maluku. Jumlah tersebut sedikit bila dibandingkan dengan kopra yang diperoleh sebelum perang yang ketika itu bisa mencapai ratusan ribu ton. Para petani dan pedagang perantara di daerah produsen kopra dikumpulkan untuk mendapatkan penyuluhan tentang tata-niaga kopra. Pihak Coprafonds menyediakan tempat gudang penampungan kopra, serta modal bagi para pedagang perantara, namun mereka banyak yang kurang berminat karena kopra yang dibeli dipantau secara langsung oleh cabang Coprafonds di berbagai daerah.

Coprafonds sebagai lembaga ekonomi yang cabang-cabangnya tersebar diberbagai daerah membawa arti penting bagi munculnya integrasi perdagangan antar pulau. Para pedagang Cina tetap menjadi pedagang perantara seperti masa sebelum perang. Hanya saja sebelum perang mereka lebih bebas menjual dan membeli kopra., tetapi ketika Coprafonds menguasai perdagangan kopra, mereka harus mengikuti standar harga kopra yang dikeluarkan oleh Coprafonds di setiap cabang. Para pedagang perantara tidak bebas menetapkan harga kopra kecuali atas petunjuk yang telah dikeluarkan Coprafonds. Selain itu juga pedagang perantara dianjurkan menampung kopra pada gudang atau toko yang telah

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> NAD, "Nederlands Commissariaat Makassar. "Archief van de Gedelegeerde te Makassar van de Hoge vertegenwoordiger van de Kroom1947-1949" no. 212.

<sup>12</sup> NAD, NHM Makassar tahun 1947 no Inv. 5114.

ditentukan pihak Coprafonds.. Di Selayar , bahkan pedagang-pedagang Cina menjadi perwakilan Coprafonds di tingkat distrik.

Pada umumnya daerah-daerah yang mata pencahariannya hanya tergantung dari kopra, senantiasa membutuhkan impor beras dari luar sebagai kebutuhan sehari. Begitu pula bagi daerah-daerah yang surplus beras senantiasa membawa beras ke daerah-daerah penghasil kopra. Hubungan yang simbiotik antara beras dan kopra membuat wilayah Indonesia Timur sangat penting dalam perdagangan antar pulau. Itulah sebabnya kehadiran KPM sebagai armada pengangkutan kopra dan beras sangat didukung di wilayah itu karena selain mengangkut kopra juga membawa beras. Hal itu menjadikan Makassar semakin penting sebagai lumbung beras dan Pusat perdagangan kopra di wilayah Indonesia bagian timur.<sup>13</sup>

Selain kebutuhan beras juga Coprafonds menjamin penyediaan. Pada tahun 1946 Direktur Coprafonds mendesak pemerintah, agar tekstil disebarakan pada wilayah-wilayah produsen kopra. Dalam tahun tersebut telah dibagikan sebanyak 1.340.000 meter tekstil ke berbagai penduduk di Indonesia bagian timur. Jumlah penyebaran tekstil setiap tahunnya terus naik, yaitu 3.050.000 meter pada tahun 1947 dan 7.890.000 pada tahun 1948.<sup>14</sup> Tujuan penyaluran tekstil tersebut adalah untuk merangsang secara langsung para petani yang selama masa Perang Pasifik banyak kekurangan sandang. Para penduduk di Indonesia bagian timur banyak menggunakan pakaian yang terbuat dari karung goni (garoro) . Selain itu juga merangsang petani agar pengelolaan kopra dengan baik dapat memenuhi kebutuhan sandang pangan mereka.

## **B. Nasionalisasi Coprafonds**

Konsep nasionalisasi mulai menjadi tema pembicaraan yang penting pada tanggal 3 Februari tahun 1946 di Yogyakarta, yaitu ketika berlangsung konferensi ekonomi Indonesia yang pertama. Dalam konferensi itu dibicarakan sistem pembangunan ekonomi Indonesia yang lepas dari sistem ekonomi kolonial. Menurutnya kebebasan ekonomi adalah bagian dari kebebasan politik yang telah dicapai melalui kemerdekaan. Dikatakan bahwa salah satu tujuan untuk membangun ekonomi nasional adalah mengganti "perekonomian kolonial" menjadi "perekonomian nasional" .Perekonomian nasional bisa berkembang jika semua elemen masyarakat terlibat untuk membangun ekonomi nasional. Para eksportir, pedagang, industriawan, petani dan buruh harus bersatu padu bersama dengan pemerintah untuk membangun "ekonomi nasional". Dengan cara itu, Indonesia dapat mengejar ketertinggalannya dari bangsa-bangsa lain di dunia. "Kesejahteraan manusia tidak hanya dinikmati oleh "*ras kulit putih*" tetapi juga bangsa Indonesia yang bangun dari ketertindasan". Para pengusaha benar-benar

---

<sup>13</sup> Department of Economic Affairs, *The Economic Review on Indonesia*, hal, 58-59

<sup>14</sup> NAD, NHM Makassar N0. Inventarisasi 5114-

memahami cita-cita ekonomi nasional dengan tidak hanya mengejar keuntungan belaka, tetapi juga bagaimana membangun ekonomi bangsanya<sup>15</sup>

Dalam dimensi yang lain nasionalisasi bisa lebih bermakna emosional karena persiapannya kurang dipikirkan. Keterbatasan tenaga ahli dan modal adalah persoalan-persoalan yang hampir ditemukan bagi perusahaan-perusahaan yang dinasionalisasi. Politik nasionalisasi berbagai perusahaan Belanda adalah usaha untuk menyelamatkan kebangkrutan negara yang hanya bisa ditegakkan melalui revolusi dengan berbagai cara. Menurut Soekarno untuk mencapainya janganlah pata semangat, Bangsa Indonesia harus tabah, harus berani, harus melakukan judi dalam melakukan gelombangnya pergolakan, atau dengan kata lain bangsa Indonesia harus berani menghadapi kehidupan dengan gaya hidup "*bertualang*". Menurutny tantangan bangsa Indonesia hanya bisa diatasi dengan melakukan usaha rekonstruksi ekonomi yang didasarkan atas penghentian ekonomi tangan-tangan liberalisme melalui penerapan demokrasi terpimpin, penyederhanaan sistem partai politik dan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing yang terus-menerus. Jika semua itu dapat dilakukan maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional<sup>16</sup>

Masalah kopra yang mencuat dalam arena perpolitikan di Indonesia, baik di tingkat lokal maupun nasional menarik dikaji setelah pembubaran Negara RIS pada tahun 1950. Coprafonds yang sebelumnya murni sebagai lembaga tata niaga kopra tiba-tiba menjadi isu politik. Coprafonds menjadi ajang perdebatan apakah "dilanjutkan" atau "dinasionalisasi" dalam sebuah lembaga tata-niaga kopra yang baru.

*Coprafonds* sebagai lembaga tata niaga kopra yang dibentuk pada masa kolonial juga mengalami program nasionalisasi. Hal itu mulai dibicarakan pada tahun 1953 melalui rapat antar Kementerian diputuskan bahwa Coprafonds akan diganti namanya menjadi Yayasan Kopra. Pada tanggal 29 Desember tahun 1954 Coprafonds secara resmi dinasionalisasi menjadi Yayasan Kopra. Nasionalisasi itu ditandai dengan perubahan anggaran dasar Coprafonds. Dalam pasal I (satu) disebutkan bahwa Coprafonds berganti nama menjadi Yayasan Kopra. Yayasan Kopra berkedudukan di Jakarta dengan pengurus hariannya terdiri atas lima orang, dua orang perwakilan pemerintah dan tiga orang utusan dari daerah-daerah penghasil kelapa. Ditambahkan pula bahwa selain lima orang pengurus harian, Menteri Perekonomian RI diberikan hak istimewa memberhentikan pengurus jika ditemukan kesalahan kepengurusan dan masalah keuangan. Tujuan utama Yayasan Kopra memberikan bantuan kepada gerakan koperasi di kalangan rakyat<sup>17</sup>. Landasan ideologi Yayasan Kopra dari liberalisme dirubah menjadi sosialisme dalam bentuk koperasi. Itu berarti Coprafonds yang sebelumnya dibentuk pada masa

---

<sup>15</sup> Ungkapan tersebut disampaikan oleh Bung Karno pada pembukaan konferensi ekonomi Indonesia yang pertama pada tanggal 15 Februari 1946

<sup>16</sup> Achmad Sanusi. "The Dynamics of the Nationalization of Dutch-Owned Enterprises in Indonesia" (Disertasi Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Indiana, 1963), hal.90

<sup>17</sup> Arsip dan Perpustakaan Propinsi Sulawesi Selatan, Arsip peribadi M. Saleh Lahade, reg. 272

kolonial, yang berorientasi kapitalisme pasar bebas segera ditiadakan. Coprafonds yang namanya berubah menjadi Yayasan Kopra harus dikendalikan oleh pemerintah.<sup>18</sup>

Nasionalisasi Coprafonds menunjukkan bukti dominannya politik dalam mengatur ekonomi Indonesia pada tahun 1950-an. Secara kritis dapat dikatakan sebagai langkah jalan pintas untuk membangun ekonomi nasional, tanpa mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan. Nasionalisasi Coprafonds tidak mempertimbangkan keahlian dan kemampuan dana untuk kelangsungan perusahaan-perusahaan. Banyak pegawai Coprafonds diberhentikan dengan alasan tidak loyal terhadap pemerintah Republik. Mereka diduga terlibat mendukung bentuk perekonomian RIS yang oleh para kelompok nasionalis yang ekstrim sebagai agen-agen bangsa kulit putih.

Seiring dengan gencarnya politik nasionalisasi yang mulai dilakukan pada 1951 berdampak pada menurunnya ekspor kopra ke Belanda. Dalam tahun 1948 ekspor kopra dari Makassar ke Belanda 162 ribu ton, kemudian pada tahun 1952 turun menjadi 95,703 ton. Penurunan itu menunjukkan bahwa masalah politik turut mempengaruhi menurunnya ekspor kopra ke Belanda. Berbeda dengan Filipina sebagai bekas wilayah jajahan Amerika Serikat, ekspor kopra Filipina ke Amerika Serikat terus meningkat yaitu dari 60,2 ton pada tahun 1947 menjadi 160,43 ton pada tahun 1952.<sup>19</sup>

Pemusatan Yayasan Kopra di Jakarta membuat wilayah-wilayah penghasil kopra mulai kehilangan haknya dalam menentukan tata niaga kopra. Di berbagai daerah produsen muncul sistem barter dengan atas nama kepentingan pembangunan daerah. Pemerintah Pusat selain berusaha mempertahankan Yayasan Kopra juga membuka peluang perusahaan lain bergerak di bidang tata niaga kopra. Sebaliknya di tingkat propinsi pemerintah daerah secara terang-terangan mengeksport kopra dengan sistem barter tanpa diketahui oleh Yayasan Kopra Pusat. Untuk memecahkan kedua perbedaan itu maka Menteri Ekonomi RI Isqak memutuskan agar pembelian dan penjualan kopra tidak hanya dimonopoli oleh Yayasan Kopra tetapi juga diberikan kepada para eksportir nasional. Ia mengharapkan agar Yayasan Kopra dapat mengurangi monopolinya terhadap penjualan kopra, sehingga eksportir nasional lainnya dapat juga membeli dan menjual kopra. Isqak mengusulkan agar eksportir nasional bisa diberikan jata secara khusus minimal 15.000 ton perbulan. Dari hasil penjualan itu pemerintah berharap dapat memperoleh komisi sebesar dua persen. Dari hasil dana itu pemerintah bisa mensubsidi petani kelapa minimal Rp. 3 000.000. per tahun.<sup>20</sup> Namun kebijakan itu tidak berhasil karena pihak Yayasan Kopra tetap bertahan sebagai lembaga ekonomi yang memonopoli kopra.

Ketidak berhasilan Kasimo (Partai Katolik) mempengaruhi Coprafonds dengan memberikan peluang kepada pengusaha nasional, membuat Kasimo diberhentikan

---

<sup>18</sup> Arsip dan Perpustakaan Wilayah Sulawesi Selatan. Arsip pribadi M Saaleh lahade no. Reg.278.

<sup>19</sup> NAD. NHM Makassar tahun 1948 dan tahun 1952. No. 5114

<sup>20</sup> Arsip dan Perpustakaan Propinsi Sulawesi Selatan. Asip Negara Indonesia Timur Reg 195. dos.51

dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Pengelola Yayasan Kopra. Ia diganti oleh Mr. R. Pratikno Sastrohadikusumo dari Partai Masyumi Indonesia (PMI). Dalam posisinya sebagai Ketua Dewan Pengelolah Yayasan Kopra, Mr.R. Pratikno juga berusaha mengurangi peran Yayasan Kopra dengan memberikan peluang yang luas kepada eksportir swasta, namun usaha itu tidak terwujud karena Persatuan Eksportir Nasional mengalami kesulitan pemasaran, hal itu disebabkan rata-rata pasaran kopra adalah perusahaan asing yang sekian lama telah terbangun jaringan perdagangan dengan Yayasan Kopra.

Ketidakpuasan pengelolaan Yayasan Kopra bukan saja terjadi di tingkat pusat tetapi juga di daerah, misalnya Soumokil sebagai pengurus Yayasan Kopra wilayah Maluku Selatan tidak mempercayai lagi Yayasan Kopra untuk menguasai pembelian kopra di daerah Maluku dan Papua New Guinea. Bahkan ia menuntut agar kopra tidak dijual lagi kepada Yayasan Kopra. Dalam tahun 1952 Soumokil melalui gerakan Republik Maluku Selatan (RMS) menahan kopra dari Maluku dan Irian Barat. Menurut Soumokil alasan penahanan kopra dari kedua wilayah itu hanyalah bertujuan untuk menambah kas pembangunan daerah pnghasil kopra. Ratusan ton kopra ditimbun di pelabuhan Sorong oleh organisasi RMS, bahkan pada tanggal 7 Maret 1952 organisasi RMS menuntut kopra itu sampai di tingkat pengadilan. Dalam perkara kopra itu Organisasi RMS memenangkan di Pengadilan sebagai pemilik yang sah dari berbagai partai kopra di daerah Sorong. Namun Pemerintah RI di Makassar atas nama Yayasan Kopra menolak hal itu dengan alasan tidak mengakui keberadaan Soumokil dalam kepengurusan Yayasan kopra untuk wilayah Maluku.<sup>21</sup>

Dalam konferensi raja-raja Sulawesi yang berlangsung pada tanggal 3-4 Feberuari 1952 juga menuntut ditegakkanya Undang-Undang Otonomi Daerah no 22 tahun 1948 dan UUDS no 44 tahun 1950 yang menegaskan bahwa semua wilayah bekas Negara Indonesia Timur mempunyai hak asal usul yang sama seperti halnya pada masa sebelum kemerdekaan. Mereka mempunyai pemerintahan yang bersifat otonomi luas seperti halnya keistimewaan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Propinsi Yogyakarta. <sup>22</sup> Menurut para peserta konferensi kalau tuntutan otonomi luas tidak dipenuhi oleh Pemerintah Pusat maka akan membahayakan hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah di Indonesia Timur.

Tuntutan otonomi luas setiap tahunnya terus berkembang, bahkan Gubernur Sulawesi Selatan, pada tanggal 2 Februari 1957 Andi Pangerang Daeng Parani berangkat ke Jakarta untuk menyampaikan tuntutan kepada menteri Dalam Negeri agar Propinsi Sulawesi Selatan diberi otonomi yang luas. Andi Pangerang Daeng Parani mengusulkan agar penghasilan daerah diberikan 70 % untuk pembangunan daerah dan 30 % untuk Pemerintah Pusat, juga meminta diberi modal sebesar Rp 350 juta, untuk membiayai pembangunan Sulawesi. Dalam tuntutan itu Andi Pangeran Petta Rani mengancam pemerintah pusat bahwa jika tuntutan itu tidak dipenuhi

---

<sup>21</sup> Arsip Ministerie Buitenlanze Zaken” Rechtsgeeding van de “RMS” Betreffende Partij Copra te Sorong. No. 2024

<sup>22</sup> Arsip dan Perpustakaan Propinsi Sulawesi Selatan. Arsip pribadi M. Saleh Lahade reg-229. Dos. 13

dalam waktu satu bulan kemudian maka ia tidak akan bertanggungjawab terhadap kemungkinan yang akan terjadi di Sulawesi.<sup>23</sup>

Dalam melihat permasalahan munculnya kericuhan tata-niaga kopra minimal disebabkan oleh dua faktor

- 1 Konflik tata niaga kopra di Indonesia Timur terjadi karena pemerintah pusat berusaha mengendalikan tata-niaga kopra ke Jakarta
- 2 Dalam periode 1946-1949 Negara Indonesia Timur telah menerapkan keterbukaan dan otonomi luas. Para tokoh-tokoh daerah sepakat membubarkan negara federal tetapi tidak sepakat melaksanakan model sentralisasi yang segala keputusan pembangunan daerah ditentukan oleh Jakarta.<sup>24</sup>

Kedua faktor tersebut di atas pada prinsipnya adalah penegakan gagasan trilogi perjuangan daerah seperti yang disampaikan oleh pidato Bung Hatta pada tanggal 17 Oktober 1952. tiga trilogi perjuangan daerah yang dimaksud itu adalah mengembangkan "nation building", asas-asas hak dan kebersamaan warga negara serta pembangunan "karakter identitas nasional"<sup>25</sup>. Gagasan tersebut tersebut selayaknya harus benar-benar dipahami oleh Pemerintah Pusat, sehingga hubungan antara pemerintah Pusat dan daerah tetap terjalin dengan kerangka Negara Kesatuan RI.

Bila dibandingkan Indonesia dengan India pada pasca kemerdekaan masing-masing, kemerosotan ekonomi di kedua negara itu mempunyai perbedaan. Hal itu disebabkan karena Pemerintah Belanda melancarkan terus agresinya sehingga semangat anti penjajahan terus berkobar. Sebaliknya di India Pemerintah Inggris secara sadar melepaskan jajahannya bahkan memasukkan bekas jajahnya sebagai negara persemakmuran. Itulah sebabnya di India pada pasca kemerdekaan diwarisi modal dari Inggris berupa sistem pengangkutan, aparat administrasi tetap bekerja, pembangunan proyek besar dan valuta asing tetap berlanjut. Sebaliknya di Indonesia diwarisi oleh kehancuran infrastruktur transportasi, prasarana administrasi dan manajemen yang terlatih tidak berjalan. Singkat kata cadangan valuta asing dan sarana administrasi tetap berlanjut. Uang poundsterling Inggris tetap digunakan untuk melanjutkan pembangunan di India. Di Indonesia pada akhir tahun 1949 cadangan valuta asing hanya sekitar \$ 142 juta. Jumlah tersebut sangat rendah dibandingkan pada tahun 1945 yang jumlahnya \$ 458 juta.<sup>26</sup>

Ketika pengakuan kedaulatan pada tahun 1949 pemerintahan Indonesia dibebankan utang sebesar f 1,56 milyar. Inflasi yang meningkat terus setelah kemerdekaan memaksa pemerintah mendevaluasi rupiah pada bulan September 1949. Pendapatan nasional Indonesia pada tahun 1950 masih jauh di bawah pada tahun 1940.<sup>27</sup> Untuk mengurangi inflasi pada tahun 1950 Pemerintah Indonesia

---

<sup>23</sup> Jarah Dam XIV/ Hasanuddin, Op-Cit, hal, 25 Tahun Kodam XIV Hasanuddin,, 1957-1982, Bandung: , Angkasa 1982, hal, 79.

<sup>24</sup> Boyd R. Compton, Pengantar Fachry Ali. Kemelut Demokrasi Liberal. LP3ES 1993,

<sup>25</sup> ANRI. RI. Arsip Lisan M. Saleh Lahade no. 80 A.. IV.03.04 kaset 39 A.

<sup>26</sup> *Ibid*, hal, 53, Lihat pula Karr Charlesworth, A. *Banking System in Transition. The Origin, Concept and Growth of the Indonesian Banking Sistem*, The New Nusantara Publishing Coy, Jakarta, tahun 1959. hal,5.

<sup>27</sup> Tulus T.H. Tambunan. *Politic Economic History of Indonesia: A. Short Analitical Descriptions: 1949-1990*. Rotterdam, Ersamus University Rotterdam 1991, hal,18-22

terpaksa menjalankan kebijakan dengan menggunting uang sah menjadi dua bagian. Bagian pertama masih berlaku, sedangkan bagian kedua menjadi pinjaman obligasi pemerintah yang berjangka panjang, namun kebijakan itu tidak banyak manfaatnya karena kesulitan ekonomi terus berlanjut.

Kelompok nasionalis, yang mencoba berusaha meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui transmigrasi penduduk Jawa ke luar Jawa, namun juga tidak berhasil. Hasil perkebunan besar pada tahun 1950 masih juga di bawah angka yang dicapai pada tahun 1940. Sektor pertanian yang sedikit membaik berada pada sektor tanaman pertanian rakyat. Produksi pertanian rakyat dari kopra dan karet naik sangat tajam. Pada tahun 1954 hasil dari kedua komoditi itu terus meningkat. Hasil karet rakyat meningkat dua kali lipat bila dibandingkan pada tahun 1940. Begitu pula hasil kopra dari perkebunan rakyat naik tiga kali lipat bila dibandingkan dengan hasil kopra yang dicapai pada tahun 1940.

Kegagalan membangun ekonomi tahun 1957 terletak pada manajemen ekonomi Indonesia secara makro pada pasca kemerdekaan diawali dengan kurang baik, meskipun Indonesia berdaulat setelah tahun 1950. Kelompok moderat merasa bahwa kemerdekaan politik tidak bisa disertai dengan kemerdekaan ekonomi. Revolusi Indonesia belum saatnya memasuki revolusi ekonomi. Lebih dari 100 ribu warga Belanda tetap memegang peran penting dalam perekonomian Indonesia pada awal kemerdekaan. Perusahaan Belanda masih tetap mendominasi perdagangan ekspor-impor, perbankan, bahkan perkapalan. Lebih 1000 pegawai negeri masih dipegang oleh Orang-orang Belanda yang menduduki posisi puncak birokrasi Indonesia. Banyak penasehat ekonomi yang lebih berpihak pada kepentingan Belanda yang secara otomatis mengurangi posisi ekonomi nasional.<sup>28</sup>

Gaung gelombang nasionalisasi perusahaan-perusahaan yang tak terelakkan lagi bukanlah suatu hal yang mengejutkan. Hal itu disebabkan karena politik nasionalisasi yang telah berlangsung sejak bulan Desember tahun 1951 seperti *Javasche Bank* (Bank Sentral Indonesia).<sup>29</sup> Namun tidaklah mengejutkan karena penanganan nasionalisasi secara administratif masih berada di bawah pengawasan pemerintahan sipil. Baru 10 Desember 1957 dengan dikeluarkannya UU Nasionalisasi pengawasannya di bawah langsung pada Pusat Administrasi Perang hal itu ditandai dengan dimuatnya UU Nasionalisasi dalam UU Darurat Militer tanggal 3 Desember 1957, yang menyatakan bahwa jabatan manajer perusahaan-perusahaan Belanda akan diserahkan kepada orang yang diangkat atau disetujui oleh penguasa militer. Sejak itu manajer-manajer perusahaan-perusahaan Belanda berada di tangan para perwira militer.

Ribuan perusahaan di seluruh Indonesia diambil-alih oleh militer. Hal itu ditunjukkan dengan pengangkatan ribuan perwira menjabat sebagai direktur baru pada perusahaan-perusahaan yang dinasionalisasi. Nasionalisasi atau tindakan pengambilalihan perusahaan-perusahaan berlaku bagi semua perusahaan milik Belanda. Berbagai bentuk perusahaan dalam perekonomian nasional dijabat oleh

---

<sup>28</sup> Tulus T.H. Tambunan. *Ibid.*, hal. 22-25

<sup>29</sup> John. O. Sutter. *Op-Cit*, hal.672

militer . Itu berarti militer mempunyai tugas tambahan selain memulihkan keamanan atau melaksanakan program rehabilitasi juga sebagai manajer perusahaan-perusahaan.

Keterlibatan para komandan tentara sebagai motor penggerak penyelundupan berakibat pada melemahnya sumber kekuatan ekonomi. Para komandan tentara memanfaatkan kondisi itu untuk mencari kekayaan pribadi dengan memanfaatkan sistem barter.<sup>30</sup> Dalam sistem barter, para pedagang menghubungi perwakilan-perwakilan asing, seperti konsul Inggris di Singapura dan konsul Amerika Serikat di Filipina. Selain itu juga mempunyai hubungan secara langsung kepada para pedagang, misalnya Thoeng Liong Hoei, Tjan Yan & Co dan Kho Kin Lang yang terkenal sebagai pedagang barter di Singapura pada tahun 1950-an.<sup>31</sup>

Untuk menjaga agar barter tetap bisa memperoleh devisa terhadap daerah, maka usaha yang dilakukan adalah mengaktifkan kembali Undang-Undang perdagangan yang mengatur tata-niaga ekspor kopra. Adapun isi peraturan itu adalah sebagai berikut:

1. Segala hal mengenai persoalan kopra ditangani langsung oleh Departemen Urusan Ekonomi.
2. Menempatkan Makassar sebagai pusat wilayah perdagangan kopra
3. Menertibkan izin tingkat perdagangan kopra melalui tiga bentuk yaitu, konsumsi di daerah sendiri, perdagangan antar pulau dan tata niaga ekspor.
4. Pengumpulan kopra diatur sepenuhnya oleh tiap-tiap onderafdeling
5. Menetapkan pelabuhan Makassar, Bitung, Ambon, sebagai pelabuhan pengumpul (*accumulate haven*) untuk komoditas kopra

Selain tata-niaga ekspor kopra juga diatur tata-niaga dalam perdagangan antar pulau. Dalam perdagangan antar pulau ditetapkan berbagai peraturan untuk mengirim kopra antara lain:

1. Jumlah maksimum tiap mutan kapal dalam perdagangan antar pulau setiap bulannya diatur oleh Badan Usaha Kopra (BUK).
2. Dasar pelaksanaan mengenai transaksi pengiriman diatur dalam perjanjian.
3. Pelaksanaan pengangkutan dan pelayaran diatur dalam kontrak pengangkutan.
4. Pelaksanaan mengenai bahan-bahan yang penting diatur dalam kontrak.
5. Pada prinsipnya pelayaran dan perdagangan kopra merupakan tanggungan akumulasi pelayaran.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Anhar Gonggong . “ Abdul Qahhar Muzakkar dan Gerakan DI.TII di Sulawesi Selatan 1950-1960 (Jakarta: Disertasi Univ. Indonesia 1990) hal. 408.

<sup>31</sup> Christiaan Heersink. *The Green Gold of Selayar A Socio-Economic History of an Indonesian Coconut Island c. 1600-1950: Perspectives from a Perihery*, Academisch Proefschrift ter verkerijging van de graad van doctor aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. 1985, hal, 129.

<sup>32</sup>. Arsip M. Saleh Lahade reg-208

Namun juga harus disadari bahwa munculnya sistem barter itu karena sistem ekonomi belum mapan. Negara yang baru merdeka belum mampu mengatasi ekonomi akibat perang, di lain pihak kondisi topografi pantai membuka peluang perdagangan yang selalu menjanjikan harapan ekonomi yang lebih baik

### C. Coprafonds Di Pindahkan ke Jakarta

Kerucuhan tata-niaga kopra antara pemerintah pusat Jakarta dengan kelompok-kelompok regional di Indonesia Timur bermula ketika kantor pusat Coprafonds di Makassar di pindahkan ke Jakarta. Pemindahan kantor tersebut membuat tata-niaga kopra di Wilayah Indonesia Timur tidak jelas bahkan isu ekonomi berkembang menjadi isu politik melalui perlawanan daerah terhadap Pemerintah Pusat.<sup>33</sup>

Ketua Panitia Pemindahan Coprafonds L.C.L. Lasut menjelaskan bahwa pemindahan itu sesungguhnya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi negara yang morat-marit akibat perang.<sup>34</sup> Di samping itu pemindahan tersebut juga bertujuan menegakkan kekuasaan pemerintah pusat di bidang ekonomi, yaitu dengan mengurangi peran orang-orang Belanda dalam penguasaan Coprafonds

Dalam penjelasan itu diketahui bahwa Parlemen NIT tidak mendukung pemindahan Coprafonds ke Jakarta, bahkan Tim Panitia yang telah dibentuk oleh pemerintah Pusat Jakarta dianggap tidak mampu mengatasi perbedaan-perbedaan yang muncul di kedua belah pihak. Untuk menjembatangi perbedaan itu maka Tan Tek Heng yang mewakili Menteri Urusan Ekonomi mengharapkan agar perbedaan antara Pemerintah federal NIT dengan Pemerintah RI dapat dipecahkan.<sup>35</sup>

Pada tanggal 4 Maret tahun 1949 terjadi perubahan tata niaga pembelian kopra. Perubahan itu bertujuan untuk memberikan peluang yang besar bagi pedagang-pedagang eceran dalam pembelian kopra dan terbuka berhubungan langsung dengan Coprafonds. Untuk mencapai sasaran tersebut maka berbagai langkah yang dilakukan antara lain:

1. Mengadakan pembelian kopra untuk bruto tanpa potongan tarra dari pembungkusnya.
2. Menaikkan persentase utang pinjaman dari 90 % menjadi 95 %
3. Memberikan uang pinjaman sesuai dengan ukuran timbangan kopra yang telah dimasukkan (tanpa dikurangi susutannya).

---

<sup>33</sup> Dalam aspek politik, krisis kopra telah menyebabkan ketidak stabilan regional di Indonesia, kelangkaan persatuan, konflik dalam komando tubuh Angkatan Darat dan ketimpangan pembangunan ekonomi menjadi masalah pokok topik pembicaraan. Untuk lebih jelasnya lihat John. O. Sutter. *Indoneianisasi: Politics in a Changing Econmy 1940-1955*, Ithaca, Cornell University Press, April 1959, hal 931. Lihat pula Fachry Ali, Pengantar ." Runtuhnya Yayasan Kopra" dalam *Kemelut Demokrasi Liberal*, Surat-Surat Rahasia Boyd R. Compton., Jakarta: LP3ES 1992, hal 395

<sup>34</sup> Arsip Ministerie Buitenlanze Zaken" Rechtsgeeding van de " RMS" Betreffende Partij Copra te Sorong. No. 2024

<sup>35</sup> Akibat adanya konflik pemindahan Yayasan Kopra Ke Jakarta membuat Yayasan Kopra kurang efektif sebagai lembaga ekonomi pemerintah NIT. Karena itu pemerintah NIT dan parlemet NIT menyetujui persetujuan Pemeindahan Yayasan Kopra baru pada tanggal 31 Oktober 1949, meskipun beberapa anggota Parlemen NIT tidak mengerti alasan pemindahan itu, salah satu di antaranya adalah Soumokil Jaksa Agung NIT. Untuk lebih jelasnya Lihat hasil Perundingan Badan Perwakilan Sementara Negara Indonesia Timur, Sidang kedua tahun 1949, hal, 166, 187,194,297,298,-322-324 dalam Walter Rorinpandai Sigarlaki. Was director Of the NIT Coprafonds. Lihat pula John. O. Sutter. Op--Cit. hal, 594

4. Mengurangi waktu penimbunan dari 3 minggu menjadi 2 minggu.<sup>36</sup>

Perdagangan antar pulau hanya dilakukan oleh Koperasi Kopra, Perusahaan Niaga Kopra. Perusahaan swasta nasional yang mendapat pengakuan dari Departemen perdagangan. Perdagangan antar pulau yang dapat diikuti sertakan adalah perusahaan-perusahaan yang mempunyai perwakilan di daerah produksi kelapa, para perusahaan yang membeli kopra yang tujuan utamanya adalah pabrik-pabrik minyak kelapa. <sup>37</sup>

Ketika Coprafonds dipindahkan ke Jakarta, di setiap wilayah produsen kopra dibentuk Badan Koperasi Kopra Daerah. Badan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk mengumpulkan kopra di daerah sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan modal yang mereka miliki. Bila Koperasi kopra Daerah tidak sanggup maka Pedagang Antar Pulau (P.A.P) diberi hak untuk membeli kopra. Pembagian dan pengumpulan kopra harus mendapat surat rekomendasi dari Perwakilan Departemen Perdagangan di daerah tersebut <sup>38</sup>

Ketika ekspor kopra sepenuhnya dimonopoli oleh Coprafonds, para eksportir di luar Coprafonds tetap berjalan. Misalnya eksportir yang di bawah Organisasi Persatuan Produksi Ekspor Hindia Belanda. Organisasi itu tidak hanya mengekspor kopra tetapi juga berfungsi sebagai lembaga perhimpunan ekspor kopra Hindia Belanda yang berpusat di Batavia. Organisasi ini memberikan komisi kepada eksportir sesuai dengan jumlah kopra yang telah mereka kumpulkan. Biasanya eksportir yang bernaun di bawah organisasi itu mendapat komisi 0,5 ½ sampai 2,5 %. Komisi itu sebagai ganti rugi pemulihan bagi eksportir yang menderita kerugian besar ketika sebelum Perang Pasifik menderita kerugian besar. Pembiayaan ekspor kopra seluruhnya dipusatkan di Batavia, di mana empat bank besar masing-masing bisa menguasai 25% harga pembelian kopra. <sup>39</sup> Namun Organisasi ini pengaruhnya di Indonesia Timur tidak terlalu kuat karena Coprafonds hampir tidak melepaskan wilayah produsennya akibat kerjasama dengan para pejabat-pejabat daerah, meskipun organisasi itu harus diakui sebagai organisasi persatuan ekspor kopra yang menegakkan kebebasan pasar. Namun tetap menunjukkan bahwa Indonesia Timur merupakan wilayah produksi dominan (grafik 3) :

### **Grafik.3** **Perkembangan Ekspor Kopra Indonesia 1951-1957**

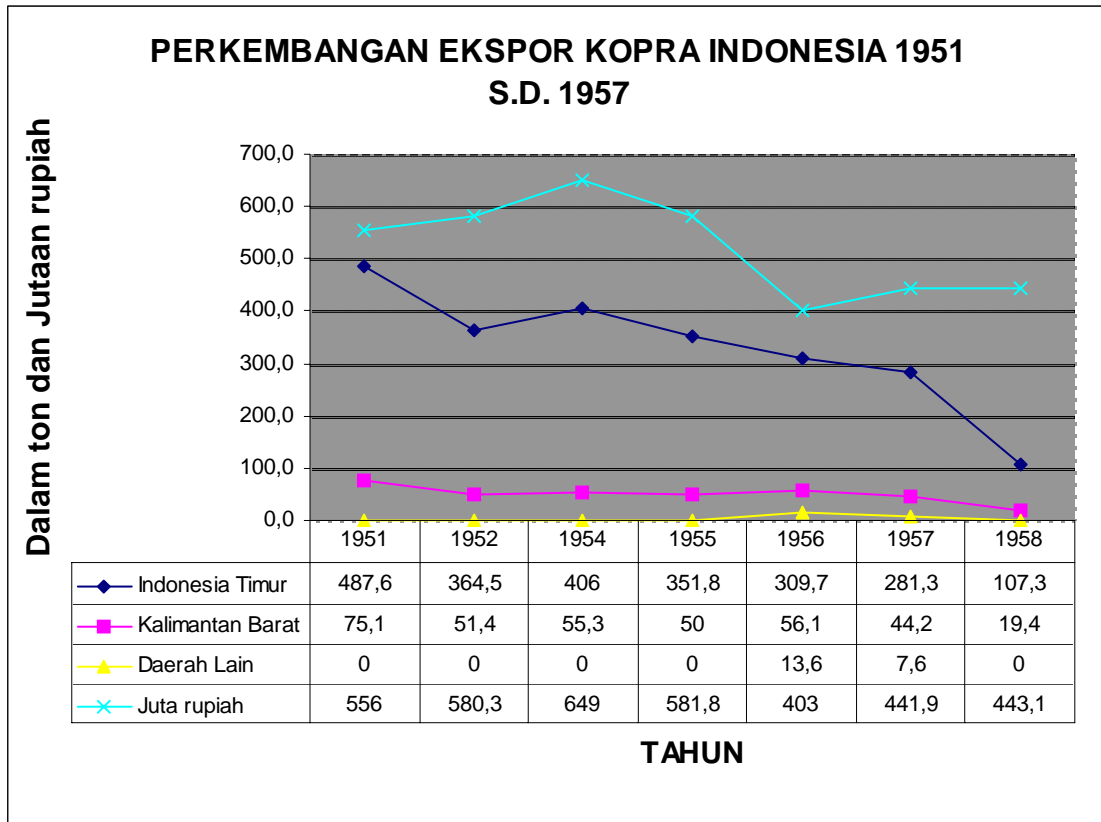
---

<sup>36</sup> Arsip Pribadi M. Sale lahade No reg. 244.

<sup>37</sup> *Ibid*

<sup>38</sup> Arsip dan Perpustakaan Wilayah Sulawesi Selatan. Arsip pribadi M Saleh Lahade no. Reg.278

<sup>39</sup> Verslag van Nederlandsche. Handel Maatschappij over het jaar 1947, hal,80

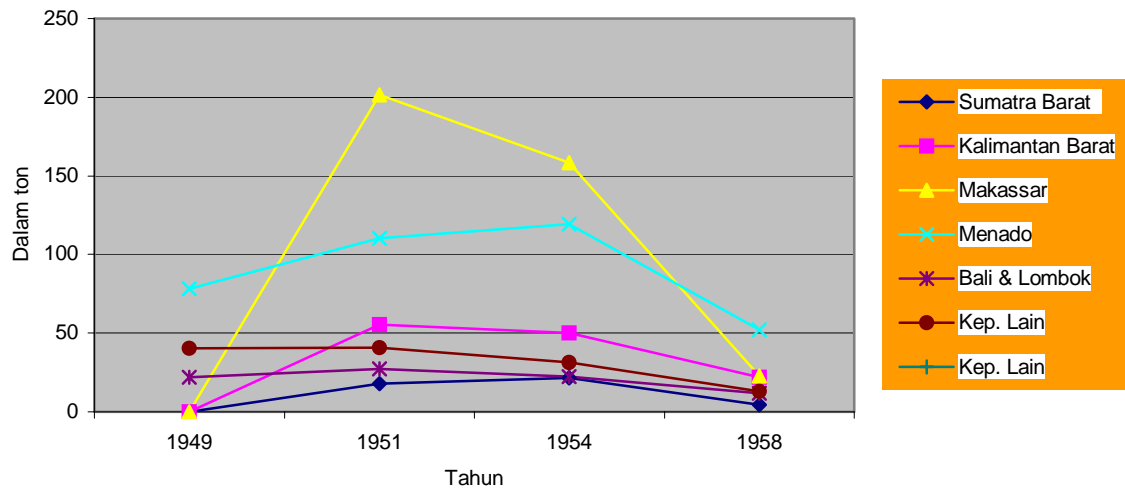


Sumber: Pusat Statistik RI. Laporan Ikhtisar Tahunan Impor dan Ekspor Indonesia, 1954. Hal.XXIII-XXIV; laporan Yayasan Kopra 1951-1957 lihat pula laporan Tahunan Pembukuan Bank Indonesia 1952-1958 hal. 182

Fluktuasi perkembangan ekspor kopra dari berbagai wilayah di Indonesia menunjukkan bahwa tata niaga kopra mulai tidak teratur. Dalam periode tahun 1954-1958 ekspor kopra dari Makassar menurun secara pesat. Di Manado dalam periode tahun 1949-1958 ekspor kopra meningkat. Meningkatnya ekspor kopra Manado pada periode itu menunjukkan bahwa kopra yang berasal dari Manado tidak lagi diekspor melalui pelabuhan Makassar. Daerah-daerah produsen kopra seperti Sumatra Barat, Kalimantan Barat, Maluku Bali dan Lombok (grafik-4)

**Grafik 4**  
**Perbandingan Ekspor Kopra Makassar Dengan**  
**Berbagai Penghasil Kopra di Indonesia**

Perkembangan Ekspor Kopra Indonesia tahun 1949-1958



Sumber: The Economic Review of Indonesia. Batavia: Department of Economic Affairs. Batavia. Vol. 1.1950. Pusat Statistik RI. Laporan Ikhtisar Tahunan Impor dan Ekspor Indonesia, 1954. Hal.XXIII-XXIV;Laporan Yayasan Kopra 1951-1957

Menurut Saroso, menurunnya nilai ekspor kopra Indonesia tahun 1954 disebabkan oleh minimal empat hal, antara lain:

1. Sejak tahun 1953 peraturan pemerintah di bidang ekspor kopra sering berubah-ubah sehingga membingungkan pihak konsumen.
2. Tata niaga organisasi pengumpulan kopra berubah yang mempengaruhi persediaan kopra;
3. Peraturan pengangkutan kopra ke Eropa pada tahun 1954, ternyata tidak memenuhi harapan untuk meningkatkan ekspor.
4. Pasaran kopra Eropa lebih memilih Filipina bila dibandingkan dengan Indonesia karena kualitas kopra Filipina semakin membaik.

Menurunnya ekspor kopra Makassar sebenarnya baru mulai dipersoalkan secara terbuka ketika serangkaian perdebatan mengenai Undang-Undang Koperasi Kopra no 179 tahun 1949. Dalam konteks lebih luas perdebatan itu semula berkaitan dengan konstelasi politik yang tengah berkembang di Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan yaitu muncul kritik tentang kurangnya perhatian pembangunan daerah produsen oleh para perwira militer dan pejuang terhadap pemerintah pusat. Karena situasi itu semakin memuncak yang pada akhirnya meluas sampai pemberontakan.

Dalam satu segi rancangan pembentukan koperasi kopra, tampaknya merupakan lanjutan dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Tujuan dasarnya adalah mengatasi kekuarangan-kekurangan yang terjadi dalam tata-niaga kopra.. Perusahaan-perusahaan pribumi diberi kesempatan yang lebih luas untuk melakukan pengelolaan ekonomi yang lebih baik dengan membuat perubahan besar terhadap ekonomi lokal yang menekankan para pejuang-pejuang veteran yang bisa

berhubungan langsung dengan eksportir di luar negeri.<sup>40</sup> Di lain pihak penerapan kopra tidak memperhitungkan dampak dari nasionalisasi yang kurang melibatkan para pedagang-pedagang Cina sebagai penggerak ekonomi .

Kemunduran ekspor kopra dari Indonesia Timur pada akhirnya melibatkan pemerintah pusat untuk ikut memecahkan persoalannya. Sebagaimana terbukti kemudian, masalahnya jelas bukan soal pro dan kontra terhadap adanya kebijakan tata-niaga yang luput dari perhatian pemerintah pusat, melainkan kurangnya respon pemerintah pusat terhadap pembangunan daerah produsen. Berbagai pendapat bermunculan yang pada prinsipnya adalah sama , yaitu bagaimana langkah-langkah konkret yang harus diambil, sehingga hasil ekspor kopra bisa juga dinikmati oleh daerah produsen, khususnya dalam pembangunan daerah, bukan saja untuk kepentingan pemerintah pusat .<sup>41</sup>

#### **D. Militer Dalam Penyelundupan Kopra**

Di Wilayah TT.VII. Panglima Sumual mengeluarkan surat keputusan mengenai peraturan urusan kopra di wilayah TT VII pada tanggal 15 Maret 1957. Isi surat itu antara lain : mengusulkan pembentukan Badan Urusan Kopra (BUK) TT VII di Makassar untuk menentukan politik perkopraan secara integral, melikwidasi Yayasan Kopra, monopoli pembelian kopra di tiap daerah produsen. Mereka mendirikan kantong-kantong perkopraan (Pool Kopra) yang dikoordinir oleh BUK. BUK mengawasi Politik perkopraan yang mencakup:penetapan harga pembelian, harga penjualan, alokasi lokal, alokasi intersuler, alokasi ekspor, pergudangan di pelabuhan, retribusi untuk daerah, retribusi untuk Gubernur Militer, retribusi untuk pemerintahan militer TT VII, dana stabilitas, pengakutan, dan administrasi. Surat keputusan itu dikirim kepada semua sub-militer di wilayah TT VII, para Gubernur, seluruh kepala daerah, Yayasan Kopra yang dilikuidasi, Itjen P.U.TT VII .<sup>42</sup> Oleh karena Tata niaga kopra semakin kacau maka pada tanggal 11 Januari 1958 Pemerintah Pusat melarang perdagangan barter, meskipun banyak ditentang oleh para perwira militer di Sulawesi Utara khususnya yang mendukung Permesta. .<sup>43</sup> Dewan perwakilan Minahasa mengajukan sebuah mosi yang mendesak agar pemerintah pusat mengatur keseimbangan keuangan antara pusat dan daerah dengan undang-undang yang mengakui keberadaan otonomi daerah. Hal itu didasarkan atas perjanjian Kinilow pada bulan Juli bahwa sebelum ada titik temu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah maka sistem barter terus dijalankan.<sup>44</sup>

Setelah Pembubaran Yayasan Kopra tata niaga kopra mempunyai arti penting munculnya militer sebagai pemegang kebijakan dalam mengatur perdagangan kopra. Berbagai strategi dan tindakan untuk mengaktifkan peran militer dalam

---

<sup>40</sup> ANRI. Jakarta. Koleksi Sejarah Lisan, M. Saleh Lahade. Kaset.31.A.

<sup>41</sup> Berita ini dapat dilihat Dalam yayasan Kopra Dalam Komprensi Kopra di Tugu Bogor 25 Mei 1956.

<sup>42</sup> ANRI Makassar. Arsip Pribadi M. Saleh Lahade. Ibid.

<sup>43</sup> Pikiran Rakyat 14 Januari 1958.

<sup>44</sup> Pikiran Rakyat 17 Januari 1958

kegiatan ekonomi, antara lain adalah Panglima Teritorium VII Wirabuana membentuk Opsir Pekerjaan Istimewa Teritorium VII Wirabuana ( OPI.X. TT.VII) . Opsir membentuk staf yang bertujuan mengawasi langsung tata-niaga kopra sehingga barter dan penyelundupan kopra semakin berkurang.

OPI.X. TT.VII adalah sebuah organisasi untuk menyelenggarakan kegiatan ekonomi di wilayah Teritorium VII. Lembaga ini diketuai oleh Mayor Seleh Lahade melalui surat pengangkatan TT.VII pada tanggal 12 Februari 1955.<sup>45</sup> Tujuan utama OPI.X. TT.VII adalah untuk meningkatkan produksi kopra yang semakin menurun akibat penyelundupan serta mengatur jalannya ekspor kopra di pasaran dunia. Para pengusaha yang mengekspor kopra terlebih dahulu harus memperoleh izin dari pihak OPI X TT-VII atas nama Panglima. Adapun tugas-tugas OPI X TT-VII ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dan mengawasi tata niaga kopra untuk kepentingan strategi militer di kemudian hari.
2. Melaksanakan instruksi langsung dari panglima .
3. Memecahkan masalah ekonomi khususnya menjaga tata niaga kopra.
4. Jika staf OPI. X TT.VII Wirabuana mendapat kesulitan maka dapat dibantu oleh resimenten dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Jawatan Sipil.
5. Setiap minggu OPI X TT.VII Wirabuana membuat laporan perkembangan perdagangan kopra kepada Panglima TT.VII Wirabuana.<sup>46</sup>

Dalam memperlancar perdagangan kopra OPI.X. TT.VII Wirabuana juga membuka kerja sama dengan berbagai perusahaan swasta di Makassar seperti CV Wirabuana, Badan Koprasi Usaha Berjuang ( BKU Berjuang), Firma Melati, Firma Jasa Fare, Yayasan Kelapa Mandar dan Firma Mamasa & CO. Perusahaan-perusahaan tersebut mengirim kopra ke Sumatra, Jawa dan Singapura. Selain Bekerjasama dengan berbagai perusahaan juga memantau perkembangan produksi di daerah Indonesia Timur. Untuk memperlancar tata niaga kopra antar wilayah maka ada beberapa hal yang dilakukan antara lain:

- a. Melancarkan Perdagangan dengan daerah pedalaman.
- b. Membantu perdagangan inter TT VII (Manado, Ambon, Kupang) dan hubungan perdagangan dengan TT III, IV dan V.
- c. Membantu usaha ekspor impor yang mempunyai izin dari . OPI.X. TT.VII
- d. Membuka jaringan hubungan dengan para investor luar negeri untuk menanamkan modalnya di berbagai daerah di Indonesia Timur seperti

Bali,

Makassar, Pare-Pare dan Manado.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Arsip dan Perpustakaan Propinsi Sulawesi Selatan. Arsip Pribadi M. Saleh Lahade. Reg.325

<sup>45</sup> Arsip Pribadi M. Saleh Lahade *Ibid*.

<sup>46</sup> ANRI Makassar, Arsip Pribadi Saleh Lahade, Reg. 325

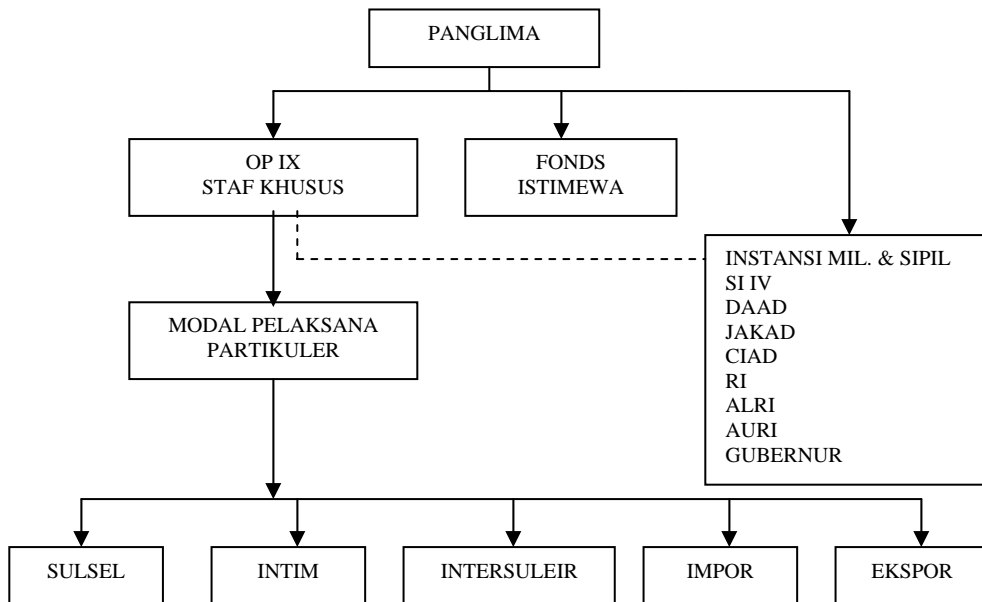
<sup>47</sup> Laporan Surat Keputusan Panglima TT VII Warouw, 25,1.1955.

Dalam hasil tata niaga kopra keuntungannya dibagi dua, yaitu 50 % untuk para eksportir dan 50% untuk OPI X., dari 50 % keuntungan OPI X TT.VII kemudian akan dibagi menjadi :

- 30% untuk TT VII Wirabuana
- 10 % untuk dana kepolisian
- 10% untuk dana keamanan sosial.<sup>48</sup>

Dalam menjalankan program OPI.X TT.VII, mereka dibantu juga oleh Gubernur, kejaksaan, ALRI, AURI. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat skema gambar di bawah ini :

**Bagan 2**  
**SKEMA KERJA OPI X . TT.VII**



----- Garis Koordinasi , —————> Garis Struktural

Sumber: Arsip dan Perpustakaan Wilayah Sulawesi Selatan, Makassar, Arsi pribadi M. Saleh Lahade. Reg.325

Dari dana itu TT. VII Wirabuana telah berhasil membiayai operasi-operasi militer, pembangunan asrama-asrama, sumbangan-sumbangan kegiatan persit, sumbangan untuk pembangunan stadion Mattoangin Makassar, Universitas Hasanuddin, sumbangan kepada korban 40.000 jiwa, sumbangan untuk para veteran, dan lain sebagainya. Pada tanggal 5 Oktober 1956 OPI X dibubarkan bersamaan dengan

<sup>48</sup> ANRI, Makassar, Arsi pribadi M. Saleh Lahade. Reg.325

dialihkannya Saleh Lahade menjadi Kepala Staf KDP SST. Tugas dan kegiatan OPI X selanjutnya dilaksanakan oleh Yayasan Wirabuana dan Yayasan Sulawesi Selatan.<sup>49</sup>

Ketika OPI X TT.VII dibubarkan Yayasan Wirabuana dan Yayasan Sulawesi Selatan tidak lagi mampu mempersatukan ekspor kopra melalui pelabuhan Makassar. Setiap kantong-kantong kopra secara bebas bisa mengirim kopra sesuai dengan permintaan pihak konsumen. Kopra tidak lagi dipusatkan di Makassar, begitu pula kopra dari Sulawesi Utara di ekspor melalui pelabuhan yang terdekat. Sebagian pula dikontrol langsung oleh para pejuang Permesta yang senantiasa menuntut otonomi perdagangan kopra.

Dalam melihat tentang pola-pola kebijakan perdagangan kopra yang disebutkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Negara lebih mengembangkan cita-cita sosialisme dari pada pengembangan perusahaan secara profesional.
2. Pengendalian harga oleh pemerintah lebih diutamakan dari pada tuntutan pasar.
3. Kekuatan ekonomi dalam negeri adalah kebijakan ekonomi yang dipusatkan pada substitusi ekspor impor melalui proteksi tinggi tanpa menghiraukan keuntungan komparatif.
4. Kecurigaan investasi asing umumnya dilarang, walaupun modal dan tenaga manager dan teknis sangat diperlukan.<sup>50</sup>

Nasionalisme ekonomi lebih mengfokuskan pada pertimbangan politik dari pada pertimbangan ekonomi dalam arti rasional. Kurang memikirkan pengembangan kelanjutan perusahaan, tetapi yang lebih utama adalah mengatur ekonomi yang didasarkan pada nasionalisme yang dikaitkan dengan paham kebangsaan. Kebijakan ekonomi lebih memihak pada pentingnya kekuasaan dari pada kepentingan rakyat

### **E. Gejolak Politik dan Hancurnya Ekspor Kopra**

Kesembrautan tata niaga kopra membuat para wilayah produsen berinisiatif mengadakan konferensi kopra di Makassar pada tanggal 19 Desember 1955. Dalam konferensi itu diputuskan bahwa segala kontrak ekspor kopra dengan luar negeri baik yang sementara berlangsung maupun yang akan datang pelaksanaanya di pindahkan ke Makassar bukan lagi Jakarta. Selain itu juga disarankan agar tata niaga kopra benar-benar memperhatikan nasib petani kelapa.<sup>51</sup>

Hasil konferensi kopra di Makassar itu melahirkan munculnya ketegangan baru antara Makassar dan Jakarta dalam tata niaga kopra. Pemusatan kembali tata niaga kopra ke Makassar membawa munculnya perbedaan antara pusat dan daerah yang mengakibatkan semakin berkembangnya sistem barter secara langsung tanpa seizin dengan Jakarta, misalnya sistem barter kopra yang dilakukan

---

<sup>49</sup> ANRI, Makassar, Arsi pribadi M. Saleh Lahade. *Ibid.*

<sup>50</sup> Harry G. Johnson *Economic Nationalism in Old New States*, Cicago: University Press 1967. hal.16.

<sup>51</sup> Arsip dan Perpustakaan Wilayah Sulawesi Selatan” Arsip Pribadi M. Saleh Lahade Dos 14. Reg.325

Propinsi Sulawesi Selatan dan Tengagara pada bulan Maret tahun 1956 berupa ribuan ton di barter dengan semen dari Kalimantan Utara dan Singapura.<sup>52</sup> Begitu pula barter kopra yang terjadi pada pada bulan Oktober 1957 senilai Rp.25.000.000,. Barter itu dapat ditukar berupa 20.000 zak semen, 10 buah mobil landrover, 2 buah mobil pick up, 2 buah mobil volk wagen anbulanc, 8 buah fordson teraktor, 3 buah crawlers buledezers, 20 buah mobil rear front tyres, 30 drum caustik soda, 10 Johnson perahu motor, 5 bal cotton mull dan 1 wish lunnan.<sup>53</sup>

Rancuhnya tata niaga kopra baik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun daerah membuat daerah Indonesia Timur kehilangan posisinya dalam tata niaga kopra. Itulah sebabnya Pemerintah Pusat turut campur tangan memecahkan masalah kopra. Masalah tersebut pada intinya adalah menemukan langkah-langkah konkret yang harus diambil sehingga hasil ekspor kopra dapat juga dinikmati oleh daerah produsen khususnya dalam memecahkan tata niaga kopra.<sup>54</sup> Karena itu pada tanggal 3 Mei 1956 diadakanlah konferensi kopra yang belangsung di Tugu Bogor. Konferensi itu disetujui desentralisasi dan demokratisasi pengurus Yayasan Kopra dengan menempatkan wakil-wakil daerah produsen kopra dalam kepengurusan. Selain itu juga diputuskan bahwa eksportir kopra nasional tidak lagi menggunakan eksportir dari luar negeri<sup>55</sup>. Meskipun setahun sebelumnya, yaitu pada bulan Januari 1955 Kelompok petani kelapa Minahasa menolak kehadiran Yayasan Kopra, yaitu ditandai dengan dibentuknya Yayasan Kelapa Minahasa.

Di berbagai daerah penghasil kopra menuntut suatu penyelesaian yang sistematis, yaitu agar Yayasan Kopra dapat membayar utangnya kepada petani kelapa yang diperkirakan berjumlah Rp.102.146.702.<sup>56</sup> Dengan pembayaran tersebut diharapkan petani tetap mempertahankan tanaman kelapa sebagai tanaman ekspor. Pemerintah diharapkan dapat menata ulang kembali para petani kelapa untuk dibayar utang-utang Yayasan Kopra kepada petani. Untuk memudahkan penataannya, maka dibentuk Panitia khusus tiap-tiap daerah penghasil kelapa. Bahkan kalau perlu tiap-tiap daerah produsen disubsidi dana pembangunan sejumlah Rp 100 juta. Hal itu bertujuan untuk memberikan rangsangan petani kelapa bahwa tanaman kelapa masih sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.<sup>57</sup>

Akibat munculnya Badan Usaha Kopra di berbagai daerah maka pada tanggal 31 Mei tahun 1956 Yayasan Kopra dibubarkan. Pembubaran Yayasan Kopra itu disebabkan karena munculnya berbagai protes dari daerah produsen akibat beban utang yang semakin besar. Wilayah-wilayah produsen kopra mulai menolak keberadaannya, akibatnya Yayasan Kopra menderita banyak kerugian. Menurut laporan Departemen perekonomian kerugian tersebut disebabkan oleh pertama, Yayasan Kopra telah melakukan pembayaran yang melebihi dari pemasukan uang,

---

<sup>52</sup> Den Haag, Archief. Ministerie Buitenlanse Zaken No. Inv. 1992

<sup>53</sup> Peberitaan Pedoman Suara Rakyat Merdeka 27 Januari 1958.

<sup>54</sup> Laporan Yayasan Kopra dalam Konferensi Kopra di Tugu Bogor 25 Mei 1956.

<sup>55</sup> Arsip dan Perpustakaan Propinsi Sulawesi Selatan, Arsip Pribadi. M. Saleh Lahade Op-Cit. .Reg.272

<sup>56</sup> ANRI. Arsip Pribadi. M. Saleh Lahade Op-Cit. .Reg.272.

<sup>57</sup> Ibid.

pembayaran itu dilakukan atas anjuran Menteri Perekonomian. Kedua, Yayasan Kopra mengalami kesulitan keuangan yang disebabkan oleh berhentinya kucuran kredit yang diperoleh dari Bank Indonesia. Setiap bulannya Yayasan Kopra membutuhkan uang sebanyak Rp.62.551.745 dengan rincian Rp.42.313.600 untuk pembelian kopra, Rp.20.238.145 untuk membayar biaya pengoperasian. Sedangkan jumlah kredit yang diterima dari Bank Indonesia hanya Rp.90.000.000,00. Itu berarti Yayasan Kopra membutuhkan Rp.62.551.745 perbulan. Sisanya itu tidak cukup untuk pembelian kopra pada bulan berikutnya karena saldonya hanya Rp.27.448.255, untuk mencukupi kebutuhan kopra maka pihak Yayasan Kopra meminjamnya kepada petani, akibatnya hutang Yayasan Kopra terus bertambah. Untuk mempermudah pelayanan masyarakat, sentralisme birokrasi segera dihapuskan. Karena penghapusan sentralisme birokrasi dapat mengurangi korupsi. Selain itu juga dapat meningkatkan kewibawaan pemerintah pusat terhadap daerah. Dalam rekwitmen calon anggota Dewan Nasional sebaiknya adalah 70 % anggotanya di ambil dari wakil-wakil daerah otonom Tingkat I. Karena daerah otonomlah yang lebih memahami prinsip-prinsip perjuangan daerah. Prinsip-prinsip itu antara lain adalah

- a. Mengumumkan berlakunya keadaan perang dan darurat perang serta pemerintah sesuai dengan peraturan pemerintah no 33. 1948 Republik Indonesia Jogyakarta
- b. Membagi wilayah Indonesia Bahagian Timur dalam lima propinsi otonom yang dikepalai masing-masing oleh seorang pejabat militer yang ditunjuk.
- c. Panglima Tentara Teritorium VII Wirabuana di samping tugasnya sebagai
- d. komandan pasukan juga sebagai kepala pemerintahan militer yang membawahi lima Gubernur militer
- e. Panglima dan kepala pemerintahan militer didampingi oleh suatu Dewan Penasehat Pusat dan Tim Ahli dalam memperjuangkan program perjuangan.
- f. Gubernur Militer didampingi oleh Dewan Penasehat Daerah dan Tim Ahli Daerah
- g. Anggota Dewan Penasehat Pusat dan Daerah untuk sementara terdiri dari tokoh-tokoh perjuangan, sambil menunggu Kongres "Bhinneka Tunggal Ika" di Makassar, dan di Ibu Kota propinsi yang masing-masing membentuk "Dewan Revolusi".

Situasi tata niaga kopra yang tidak menentu membuat beberapa daerah penghasil kopra bereaksi. Di Makassar yang semula kopra sebagai kekuatan ekonomi berubah menjadi gerakan politik anti Jakarta. Berbagai daerah penghasil kopra kecewa dan membentuk Yayasan Kelapa. Daerah yang pertama membentuk Yayasan Kelapa adalah Minahasa, yaitu ditandai dengan terbentuknya Yayasan Kelapa Minahasa pada bulan Februari tahun 1955. Kemudian di susul dengan terbentuknya Yayasan Kelapa Sulawesi Selatan, Yayasan Kelapa Rakyat Sangir Talaud dan Yayasan Kelapa Rakyat Gorontalo.

Pada perinsipnya Yayasan Kelapa yang terbentuk dari berbagai daerah menuntut Otonomi pengelolaan kopra pada daerah masing-masing. Untuk

membicarakan penuntutan otonomi pengelolaan kopra maka diadakanlah Konferensi Kinilow yang berlangsung dari tanggal 20-21 Maret 1956 di Manado. Para wakil pemerintah daerah wilayah produsen kopra, tentara dan berbagai lembaga swasta menghasilkan keputusan secara umum yaitu mengganti Yayasan Kopra menjadi Yayasan Kelapa. Selain itu juga disepakati dibentuknya lembaga koordinasi Yayasan Kelapa di tingkat propinsi.

Usaha pengendalian gejolak kopra terhadap Yayasan Kopra di Sulawesi mencapai puncaknya ketika Yayasan Kopra berhenti membayar utangnya kepada para cabang-cabangnya di berbagai daerah. Akibatnya protes dan keluhan terus membanjiri Jakarta dan Makassar sebagai markas Yayasan Kopra untuk seluruh Indonesia Timur. Pada tanggal 27 April, dibentuklah Panitia Aksi Desentralisasi Yayasan Kopra yang terdiri atas sepuluh orang. Panitia aksi tersebut kebanyakan berasal dari para pejuang veteran dan tentara, mereka mengeluarkan tuntutan yang berbunyi antara lain:

- (1) bahwa kami telah mengambil alih kepemimpinan, kekayaan dan kegiatan Yayasan Kopra di Indonesia Timur, di luar daerah Minahasa dan Sangir Talaud,
- (2) Semua persoalan yang berkenaan dengan hal di atas akan diatasi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, demi kepentingan Yayasan Kopra pada khususnya dan Republik Indonesia pada umumnya.

Direktur Yayasan Kopra Indonesia Timur dan Gubernur Sulawesi menandatangani perjanjian pada hari yang sama. Mereka merespon tuntutan-tuntutan Panitia Aksi. Mereka menerima tanpa menanyakan hakekat tujuan aksi sesungguhnya. Panitia aksi telah menjalin hubungan baik dengan pimpinan tentara di Sulawesi Selatan, khususnya para perwira komandan tentara yang berpusat Makassar. Juga diisukan bahwa bahwa para komandan tentara setempat terlibat dalam penjualan, bahkan penyelundupan kopra. Aksi tersebut diduga tak mungkin berlangsung tanpa dukungan militer.

Tanggapan Jakarta terhadap Panitia Aksi tidak terlalu serius. Perebutan kontrol kopra itu diterima, meskipun kurang mendapat respon. Pemerintah Pusat tidak mengecam Panitia Aksi, tapi segera dikirimkan kapal-kapal di berbagai pelabuhan di Indonesia Timur. Kapal-kapal tersebut mengangkut langsung dari pelabuhan-pelabuhan ke Jawa, tanpa melalui pelabuhan Makassar. Sekitar Rp. 12.000.000 dijanjikan pemerintah Pusat untuk memperbaiki keadaan para petani kopra di Indonesia Timur, tetapi uang tersebut disalurkan langsung oleh para pegawai pemerintah, lagi-lagi tak melalui Panitia Aksi yang lantang bersuara.

Pada tanggal 19 Mei, 1955 Panitia Aksi membalas dengan menyetop semua kapal kopra dari pelabuhan Makassar dan menyatakan dengan melecehkan ketentuan Yayasan Kopa yang tak populer bahwa kopra tidak dapat lagi dikapalkan melebihi bujur 116 derajat, sampai utang-utang Yayasan Kopra dilunasi. Walaupun pemerintah pusat bergerak cepat untuk mencegah penyebaran pengaruh Panitia Aksi dan mencapai puncaknya dengan membubarkan Yayasan Kopra melalui Konferensi Kopra di Tugu pada tanggal 25 Mei 1956. Konferensi itu bertujuan membahas krisis kopra. Peserta konferensi sepakat untuk menutup Yayasan Kopra

dan mendirikan sebuah Koperasi Besar Kopra, yang kontrol kebijakannya terletak di tangan petani kelapa, bukan pemerintah pusat.

Hasil konferensi Tugu itu menimbulkan harapan yang samar-samar bagi para petani kelapa.. Tanggal 12 Juli 1957 ditetapkan sebagai tanggal resmi pembentukan Koperasi besar kopra. Dalam selang waktu dua belas bulan itu, panitia-panitia persiapan di bawah arahan para pejabat pemerintah pusat mensponsori pendirian koperasi-koperasi kopra lokal dan lembaga-lembaga koordinasi propinsi. Disepakati bahwa kebijakan “penjual tunggal” akan dipertahankan, namun tak ada kejelasan mengenai peranan Yayasan Kopra di masa mendatang. Impian tentang sebuah “Koperasi Besar Kopra” sesekali disinggung pada 1950, ketika sebuah panitia antar kementerian melaporkan pengalihan Yayasan Kopra kepada manajemen Indonesia. Sekarang, tiba-tiba impian samar itu telah menjadi sebuah rencana, dan suatu batas waktu sudah ditetapkan bagi pewujudannya.

Tanggal 12 Juli sudah dekat, dan belum juga terdengar reaksi terhadap Koperasi Besar Kopra dari Yayasan Kelapa Minahasa atau Panitia Aksi di Makassar. Kedua kelompok mengambil sikap “wait and see”. Dengan kekuatan mereka yang sudah terbukti, dapatlah diperkirakan bahwa mereka akan berhak menjatuhkan penilaian atas keberhasilan upaya-upaya pemerintah pusat. Peristiwa-peristiwa mutakhir mengiyaratkan bahwa penilaian mereka akan bergantung pada besarnya otonomi keuangan yang diberikan oleh Jakarta kepada lembaga-lembaga manajemen kopra lokal dan propinsi yang bakal bermunculan di tahun mendatang.

Ditengah konflik yang menajam dari para pemimpin lokal di Manado dan Makassar, kehendak untuk mewujudkan persatuan nasional tetap kuat di Sulawesi. Reaksi kedaerahan di kawasan Sulawesi tetap menguat, meskipun kelihatannya mengalah. Untuk penengah masalah tersebut tampaknya pemerintah memilih jalan tengah dengan memberikan otonomi daerah tanpa mengorbankan kontrol atas sumber-sumber pendapatan yang penting. Situasi penyelesaian konflik di Sulawesi cukup sulit untuk mencari jalan damai.

Akibat dominannya militer di dalam kehidupan ekonomi juga berpengaruh pada tingginya anggaran militer. Selama periode tahun 1950-1958 pengeluaran anggaran tahunan militer rata-rata berkisar 25-35 persen dari anggaran belanja nasional. Jumlah personil militer pada tahun 1958 sekitar 320. ribu orang, yang terdiri atas 200 ribu orang dari Angkatan Darat, 10 ribu orang dari Angkatan laut, 10 ribu orang dari Angkatan Udara dan sekitar 100 ribu orang dari Angkatan Kepolisian.<sup>58</sup>

Penempatan para perwira militer dalam masa nasionalisasi adalah bertujuan untuk memperkuat pemerintahan sipil ketika menghadapi masalah yang sangat penting. Jadi para anggota kabinet selalu ada, sementara kekuatan legislatif dan yudikatif tidak pernah dibubarkan atau kehilangan fungsinya. Dewan militer (dewan yang bertanggungjawab bagi perumusan kebijakan umum) bukan hanya diisi oleh

---

<sup>58</sup>Achmad Sanusi, "The Dynamics of the Nationalization of Dutch-Owned Enterprises in Indonesia" (Disertasi Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Indiana, 1963), hal, 8

militer namun juga oleh aparat sipil. Konsep ini berlaku baik di tingkat pusat, propinsi maupun daerah.

Dominannya militer dalam kehidupan ekonomi di Indonesia merupakan akibat dari kesalahan bagi para pemimpin partai politik yaitu dengan kondisi yang dibentuk melalui UU Darurat Perang. Melalui UU Darurat Perang militer diberikan wewenang khusus untuk melancarkan operasi terhadap kaum pemberontak dan sekaligus memerintah daerah yang telah dibebaskan. Namun ternyata pola pemerintahan sangat rumit, dengan sistem sipil dan militer yang sering saling melanggar kekuasaan, sering bertentangan dan kadang-kadang berkoordinasi.

Berbagai konsep perjuangan di atas dapat melahirkan gejolak bagi munculnya geraka-gerakan seperatisme membuat pada tanggal 10 Februari para tokohnya diberikan ultimatum. Proklamasi PRRI pada tanggal 15 februari 1958 yang didalamnya dua Dewan tertinggi Permesta Saleh Lahade dan Mochtar Lintang, diangkat menjadi menteri menyebabkan arus kekuatan politik lokal di Sulawesi Selatan terbagi dua yakni yang pro dan yang anti- Permesta, meskipun KoDPSST Komando Daerah Pengamanan Sulawesi Selatan Tenggara (KoDPSST) bersifat netral. Ada dua alasan KoDPSST bersifat netral. pertama gerakan Permesta tidak pernah bermaksud menentang pemerintah pusat dengan menggunakan kekerasan. Kedua, di Sulawesi Selatan sudah ada pemberontakan yang menguasai pedesaan, pasukan TNI sedang dalam tahap latihan dan konsolidasi tidak dimungkinkan perlawanan fisik terhadap pemerintah pusat. Namun berbagai tokoh militer seperti H.N.V. Sumual dipecat dari militer pada tanggal 25 Feberuari 1958 secara tidak hormat dan tiga rekannya Saleh Lahade, Tumbekka dan Ottay juga dipecat yaitu pada tanggal 17 Feberuari 1958. Alasan pemecatan para perwira militer tersebut didasarkan pada tuduhan melanggar peraturan Pemerintah no 3 tahun 1958 tentang pemberhentian militer. Selain itu juga melanggar Dinas ketentaraan pasal 1 ayat 2 Sub.c yang membahayakan disiplin angkatan perang.

Untuk mencapai otonomi seluas-luasnya sesuai dengan konsep Perjuangan Semesta, maka dibentuk Badan Urusan Kopra TT VII ( B.U.K. TT.VII) yang bertujuan menentukan politik perkopraan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Semua urusan perkopraan secara integral di bawah wilayah TT VII.
- b. Melikwidasi "Yayasan Kopra". secara teratur:
- c. Segala inventaris, Yayasan Kopra dan seluruh pegawainya dipindahkan ke daerah otonom pada Tingkat Kabupaten.
- d. Segala inventaris, Yayasan Kopra dan seluruh pegawai dan pekerja Yayasan Kopra pusat di Makassar dipindahkan ke B.U.K. TT.VII

Guna mewujudkan penglikwidasian Yayasan Kopra maka Panglima Militer TT VII Wirabuana mengeluarkan peraturan yang isinya antara lain:

1. Persediaan modal (stock capital) milik Yayasan Kopra yang dilikwidasi, modalnya digunakan untuk membeli kopra

2. Daerah-daerah otonom yang diberi modal mendapat hak single buying (monopoli pembelian) diwilayahnya masing-masing
3. Setiap daerah otonom dibentuk Pusat Penampungan Kopra, dimana dalam kepengurusannya ditempatkan wakil-wakil dari daerah otonom tersebut sebagai anggota

Pusat penampungan kopra tersebut diawasi oleh suatu badan yang bernama Badan Urusan Kopra TT. VII Wirabuana (B.U.K.K) untuk mengatur tata niaga perkopraan secara keseluruhan .

Seiring dengan munculnya keresahan daerah terhadap tata niaga kopra juga muncul tuntutan pendirian propinsi baru, seperti pembentukan Propinsi Sulawesi Utara dan Tengah pada tanggal 20 Juni 1957. Pembentukan propinsi itu mengikuti pola pemerintahan di Pulau Sulawesi pada masa Hindia Belanda, yaitu Propinsi Sulawesi di bagi dua propinsi yaitu Kresidenan Menado dan Makassar. Propinsi Sulawesi Utara meliputi Sulawesi Tengah dan Utara. Sebagai Gubernur pertamanya adalah H.D. Manoppo, H.D. Manoppo mengemukakan dihadapan peserta Konferensi Permesta di Gorontalo mengemukakan bahwa pembentukan propinsi diharapkan dapat membantu memecahkan masalah kopra yang diakibatkan oleh pemusatan kontrol pemerintahan pusat atas seluruh Sulawesi. Ia menjelaskan lebih jauh " Propinsi Sulawesi tidak tahan lagi janji-janji dari Pemerintah Pusat atas pembangunan daerah. Kopra sebagai komoditas utama Propinsi Sulawesi sebaiknya ditangani daerah melalui sistem barter, karena melalui dengan cara tersebut daerah dapat membangun Andi Pangerang Daeng Parani sebagai Gubernur Sulawesi telah memberikan respon untuk pembentukan dua propinsi di Pulau Sulawesi pada bulan September 1956. Mereka merespon juga konsep Piagam Permesta yang mengusulkan agar supaya Indonesia Timur di bagi atas lima propinsi otonom, yaitu Sulawesi Selatan dan Tenggara, Sulawesi Utara dan Tengah , Maluku, Nusa Tenggara dan Irian Barat. Pembentukan Sulawesi Utara secara sepihak tanpa melibatkan Andi Pangerang Daeng Parani selaku Gubernur Sulawesi mengakibatkan munculnya pertentangan Antara Andi Pangerang Daeng Parani dengan para perwira militer dari Sulawesi Utara yang sekian lama menginginkan terbentuknya Sulawesi Utara. Hal itu tercermin ketika Andi Pangerang Daeng Parani mengatakan bahwa penggabungan kedua wilayah ekonomi ( Makassar dan Menado) adalah saling bermanfaat bagi perkembangan sosial dan ekonomi di Propinsi Sulawesi <sup>59</sup> makdunya adalah Makassar sebagai lumbung beras dan Menado sebagai penghasil kopra

Adanya perbedaan yang demikian tentu saja menyebabkan ketidak stabilan Pemerintahan di Propinsi Sulawesi. Andi Pangerang Daeng Parani mendukung pembagian daerah militer Indonesia Timur menjadi 4 komondo tetapi menentang pembentukan propinsi tersendiri bagi Sulawesi Utara. Sedangkan Ventje Sumual membantu terbentuknya Propinsi Sulawesi Utara, tetapi ingin tetap menjadi Kepala

---

<sup>59</sup> Marhaen 6 September, 1957. Lihat pula Pedoman Rakyat Makassar 24 Juni 1957.

Komando Antar Daerah Indonesia Timur ( KADIT), karena penghapusan TT.VII telah meniadakan posisinya sebagai panglima Indonesia Timur.

Terbentuknya Propinsi Sulawesi Utara membuat Makassar kekurangan kopra. Kontrol perdagangan kopra dari Makassar atas daerah pedalaman Sulawesi semakin berkurang. Penyelundupan kopra dari Sulawesi Utara melalui pelabuhan Bitung berakibat buruk terhadap situasi ekonomi Makassar yang menurut perkiraan sejak bulan Juli 1957 ada sekitar 10,000 buruh menganggur di Makassar, pabrik-pabrik minyak kelapa di Makassar ditutup karena kekuarangan kopra.<sup>60</sup>

Pada tanggal 14 Agustus 1957 Andi Pangerang Daeng Parani mengumumkan agar semua penjualan ekspor kopra dari Sulawesi Selatan dan Tenggara tetap melalui pelabuhan Makassar. Ia meminta kepada Somba dan Sumual agar tetap menjamin kekurangan kopra di Makassar yang setiap bulannya sekitar 5.000-10.000 ton .<sup>61</sup> Untuk memantau pengadaan kopra tersebut maka dibentuk Biro perdagangan darurat yang tujuannya memantau persediaan kopra di Makassar. Selain mengisi kelangkaan kopra di Makassar Andi Pangerang Daeng Parani juga menganjurkan agar dirancang Program perencanaan lima tahun untuk Indonesia Timur. Setiap daerah kabupaten diharapkan dapat membuat proposal program kegiatan pembangunan. Untuk menjamin keuangan pembangunan di Indonesia Timur maka ditetapkan sebagai daerah barter kopra. Dari hasil barter tersebut hasilnya dibagi atas 70 % untuk pembangunan daerah dan 30 % untuk Pemerintah Pusat. Agar semua daerah dapat tersentuh pemerataan maka pembangunan didasarkan atas luas daerah, bukan jumlah penduduk. Melalui model tersebut maka prinsip keadilan dan pemerataan dalam pembangunan dapat terwujud. Selain pembangunan dalam bentuk fisik juga dikembangkan sumber daya manusia. Para mahasiswa di berikan beasiswa untuk mengikuti pendidikan, baik dalam negeri maupun luar negeri.

## Simpulan

Terintegrasinya Makassar dalam perdagangan kopra antar pulau di Indonesia bagian timur, mendorong Makassar sebagai kekuatan ekonomi Hindia Belanda dan mampu menahan laju perkembangan ekonomi Singapura, yang sejak paruh abad ke-19 kedudukan Makassar mulai terancam sebagai pusat perdagangan di Indonesia Timur. Itulah sebabnya pada dasawarsa kedua abad ke-20 Makassar muncul sebagai pelabuhan enterpot, seperti halnya kedudukan Singapura.

---

<sup>60</sup> Marhaen 6 Desember, 1957, hal.2.

<sup>61</sup> Marhaen 6 Desember, 14 Agustus 1957.

Kopra yang menghasilkan minyak memberi arti penting bagi ekonomi penduduk Indonesia bagian timur ketika komoditi itu semakin dibutuhkan di pasaran dunia, yaitu dengan munculnya pabrik mentega dan sabun di Eropa dan Amerika. Oleh karena semakin pentingnya minyak kelapa maka berbagai perusahaan Eropa membeli kopra, termasuk pemerintah Belanda membangun pabrik minyak di Makassar. ( OFI. Makassar)

Dalam hubungan pembentukan ekonomi Eropa, tampaknya lebih merupakan soal perluasan ekonomi Makassar untuk mengimbangi Singapura. Bagi Belanda, komoditas kopra harus dimonopoli atau setidaknya jaringan perdagangan kopra antara Makassar dengan Singapura dikapalkan secara langsung ke Eropa. Dengan cara itu pedagang Cina lebih mudah diintegrasikan ke dalam pola ekonomi kolonial, dengan sendirinya perdagangan kopra ke Singapura dapat dihentikan. Bagi Singapura pemberhentian itu merupakan ancaman ekonomi dalam ketergantungannya dengan wilayah Indonesia bagian timur.

Analisis integrasi kopra Makassar dengan pasaran kopra dunia dapat dikatakan sebagai pembenaran bahwa ekonomi Luar Jawa tumbuh dan berkembang karena terintegrasi dengan pasaran dunia. Kajian ini telah mengungkap bahwa " Sejarah ekonomi Luar Jawa harus dilihat secara terpisah dengan pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa. Selain itu kajian ini juga mengangkat suatu problematika penelitian, yakni kerangka sejarah ekonomi kepulauan, tentang " pentingnya jaringan perdagangan antar pulau di Indonesia Timur". J.T.H. Lindblad dan Jaroen L. Touwen mengemukakan bahwa , jaringan perdagangan antar pulau di luar Jawa berkembang pesat karena berintegrasi dengan pasar dunia <sup>62</sup>.

---

<sup>62</sup> Lindblad. *Het Belang van de Buitengewesten: Economische Expansie en Koloniale Staatsvorming in de Buitengewesten van Nederlands- Indie, 1870-1942*. Amsterdam: Neha 1989 Lourens Jeroens Touwen, "Extremes in the Archipelago, Trade and Economic Development in the Outer Islands of Indonesia, 1900-1942" Proefschrift ter Verkrijging van de Graad van Doctor aan de Rijksuniversiteit te Leiden : Faculteit der Sociale Wetenschappen.1997, hal. 3-4.

Dalam hubungan dengan krisis di tahun 1930-an untuk menyelamatkan kopra yang harga pasarannya semakin merosot maka pemerintah Belanda membentuk "*Het Coprafonds*". Pemerintah Belanda berusaha mengintervensi pasar agar harga kopra tetap terkendali. Tindakan itu dapat dianggap sebagai bentuk monopoli pembelian kopra pemerintah kepada para petani kelapa. Meskipun ada upaya dari "*Volksraad*" melalui mosi tak percaya kepada pemerintah. Namun kebijakan itu sulit dihapuskan karena dalam kenyataannya "*Het Coprafonds*" dibentuk untuk menanggulangi krisis ekonomi.

Begitupula krisis ekonomi Makassar yang semakin terasa sejak Coprafonds dinasionalisasi pada tahun 1954 membuat Makassar sebagai pusat perdagangan semakin tidak berdaya, hubungan antara Makassar dengan wilayah produksi mandek. Penyelundupan dan barter kopra dapat terjadi di mana-mana. Pemerintah mencoba mengampunasinya dengan membentuk jaringan perdagangan yang dikoordinir OPIK.TT.VII Wirabuana pada tahun 1956. Namun itu juga tidak bertahan lama, karena muncul gerakan-gerakan perlawanan daerah terhadap pemerintah pemerintah pusat tensi politiknya semakin tinggi, di antaranya adalah gerakan perlawanan Permesta.

Berakhirnya bentuk Negara Republik Indonesia Serikat (pada periode NIT), kopra sebagai komoditi ekonomi juga harus dilihat dalam "*kerangka politis*". Politik nasionalisasi terus dicanangkan untuk membentuk semangat anti imperialisme. Kemandirian politik yang dicapai tahun 1945 melalui kemerdekaan, harus ditindak lanjuti dengan kemerdekaan ekonomi melalui nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing. Meskipun secara ekonomi dapat merugikan ekonomi nasional, karena dalam proses nasionalisasi dibutuhkan keterampilan dan profesionalisme untuk mencapai hasil yang maksimal. Tidak hanya karena semangat anti imperialis, dalam artian kepentingan politik lebih dominan menentukan kebijakan ekonomi.

Dalam kerangka dominasi politik dalam perkopraan, tampaknya ekonomi perkopraan semakin terbawa dalam percaturan politik antara pusat

dan daerah. Persoalannya semula hanya berkisar pemindahan Coprafonds ke Jakarta, barter dan penyelundupan kopra sampai perlawanan daerah. Para militer di tingkat lokal mencoba meluruskan kebijakan nasional yang memihak pada pembangunan daerah<sup>63</sup>. Meskipun dengan demikian tidak sedikit di antara para perwira militer memanfaatkan kondisi itu sebagai peluang untuk memperkaya diri. Peristiwa Bitung dan Pere-Pare adalah satu contoh kasus menguatnya penyelundupan daerah yang secara terang-terangan melawan Pemerintah Pusat di Jakarta

Ketika ekspor kopra mulai diatur secara langsung oleh pemerintah, dengan dibentuknya Coprafonds pada tahun 1940 dan dinasionalisasi pada tahun 1954, tata niaga ekspor kopra yang dikendalikan oleh militer, yaitu terbentuknya OPIK. T.T.VII Wirabuana pada tahun 1956. Hal tersebut membuat tata niaga kopra semakin semraut, penyelundupan dan sistem barter kopra semakin meningkat. Ekspor kopra yang diharapkan dapat memberikan kontribusi ekonomi berubah menjadi masalah politis. Hal itu ditunjukkan dengan munculnya tuntutan para pejuang Permesta agar hasil ekspor kopra 70 % dipakai untuk membangun daerah dan 30 % untuk Pemerintah Pusat Jakarta. Tuntutan itu didasarkan pada penerapan otonomi daerah sebagaimana termuat di dalam UUDS. Namun tuntutan itu tidak dipenuhi sehingga berbagai perwira dan tokoh-tokoh nasional di daerah wilayah produsen kopra menuntut hak barter ekspor kopra guna membangun daerah

Pergolakan Permesta selain berdimensi politik, juga berdimensi ekonomi seperti faktor kesemrautan setelah Coprafonds dinasionalisasi menjadi Yayasan Kopra. Kesemrautan ekspor kopra membuat militer terlibat mengatur ekspor kopra. Mereka membentuk tata-niaga baru melalui sistem barter. Keberadaan OPIK. TT. VII. Wirabuana pada tahun 1956, dengan membawahi berbagai eksportir kopra yang dibentuk oleh para pejuang

---

<sup>63</sup> Temuan dokumen-dokumen Arsip yang mendukung hal itu adalah Koleksi Arsip Pribadi M. Saleh Lahade yang tersimpang Pada Arsip dan Perpustakaan Propinsi Sulawesi Selatan. Pernyataan-pernyataan tentang penyelundupan kopra di tahun 1950 an juga termuat dalam dokumen-dokumen Arsip Rahasia Commisariaat Makassar yang tersimpan di Archief Butenlandse Zaken Den-Haag.

veteran. memperkuat dukungan daerah terhadap desentralisasi ekspor kopra yang di monopolisasi oleh Yayasan Kopra yang di pindahkan ke Jakarta. Sulawesi Utara dan Maluku menarik integrasi jaringan perdagangannya dengan Makassar. Akibatnya integrasi ekonomi mandek, yang muncul adalah serpihan-serpihan ekonomi kepulauan.

## Daftar Pustaka

### Sumber-Sumber Arsip:

- Arsip Kementerian Penerangan 1945-1949 No. 227,228,230,254
- Arsip Biro Pusat Statistik Kepala Kabinet Persiden RI Daftar Tahun 1957 Tentang Harga Kebutuhan Pokok Sehari-Hari. No.1661
- Arsip Negara Indonesia Timur , Fungsi Coprafond dalam Perdagangan, tahun 1949
- Arsip Pribadi M. Saleh Lahade* , Laporan Triwulan Perkembangan Ekspor Kopra Seksi - 5 Territorium VII Angkatan Darat tahun 1953 Reg. No 94. Dos.5.
- Arsip Pribadi M. Saleh Lahade* , Berita Acara Pemeriksaan MR. Pratikto Direktur Yayasan Kopra dihadapan Panitia Pengedaran Anket DPR pada tanggal 13 September 1955 Reg. No 280. Dos 15.
- Arsip Pribadi M. Saleh Lahade* , Peraturan Pemerintah tentang Tata- Niaga 10 Juni 1955 Reg. No 325.
- Arsip Pribadi M. Saleh Lahade* , Ikhtisar Konprensi Kopra di Tugu Bogor 25 Mei 1956. Reg. No 272 . Dos.14.
- Arsip Pribadi Rahman Tamma, Laporan Pengumuman Jawatan Koperasi dan Yayasan Kopra Tentang Tata Niaga Kopra Tahun, 1956.
- Arsip Propinsi Sulawesi , Ekspor Yayasan Copra tahun, 1954.
- Berekening van de Afschryving of Debituren Oliefabrieken Makassar Inventarisa'tie no. 561.
- Bergrooting der kosten van ontginning eener Klapper onderneming op een perceel Woeste groden groot Inventarisa'tie no. 531
- Catatan Pidato M. Saleh Lahade Tentang Piagam Perjuangan Permesta Collectie 127 F.W.T. Hunger, 1907-1924 No. Kode 2.21.089.
- De Vertegentwoordinger de Oliefabrieken Insulinde. Copra Export Celebes 5 Juni, 1918
- Gewisselde Telegrammen Tusschen Bandoeng en Makassar van af 16 tot 22 dezer. Inventarisa'tie no. 533.

Inventaris van het Archief van de Algemeen Secretarie en het Kabinet van de Gouverneur Generaal 1944-1950 Het Openbaar Archief M.G.H.A. de Graaff; A.M. Tempelaars, *President van Oost Indonesie, Wet op de Coprabelasting*, Makassar 6 Juni, 1949

Inventaris van het Archief van de Algemeen Secretarie en het Kabinet van de Gouverneur Generaal 1944-1950 Het Openbaar Archief M.G.H.A. de Graaff; A.M. Tempelaars, *Ministerie van Financien van Oost Indonesie, Wet op de Coprabelasting*, Batavia: 2 Juli, 1949

Memorie van Overgave van Gouverneur Celebes en Onderhoorigheden, oleh Chabot, 1950.

Laporan Pertanggungjawaban OPI .X TT. VII Wirabuana Usaha-Usaha Perkembangan Perdagangan Pada Tanggal 1 Oktober, 1955

Laporan Singkat Mengenai Usaha-Usaha O.P.I. X. T.T. VII Wirabuana 12 November, 1955

Laporan Tuntutan Delegasi Kopra Kepada Pemerintah Pusat di Jakarta 2 Desember, 1954

Nederlandsche Handel- Maatschappij (NHM). Kode 2.20.01 Inventarisatie, no. 5111-5114.

Notulen Rapat Tentang Kopra Tanggal 2 Desember tahun, 1954

Specificatie van de door de Nederlandsch Indische Handelsbank Batavia in Bewaring genomen Goederen van de Olieabrieken Insulinde 15 Februari Juni 1926 Inventarisatie no. 532

Agreement Netherlands East Indies Governments the Commodity Credit Corporation and Official Embassy of the United States of America, January 1947. Inventarisatie no.1992

Memorandum no.25, 12 Juli 1952 inzake "Minister President der "RMS" Wairisal Inventarisatie no.2015

Rapporten De Ambassadeur W.G.A. Loudon 17 Maart 1947 Copra Uitvoer uit Nederlandsch Indie. Inventarisatie no.1992

Rapporten Mr. J.G. Kist. Zeeroverij in de Celebes Zee. Inventarisatie no.6306

Rapporten Dr.J. Cator, Copra Smokkel van Overste Warouw en Majoor Worang Inventarisatie no.2024

Rechtsgeding van de "RMS" Betreffende partij Copra te Sorong Inventarisatie no.2015

Reisrapport heer Crawford 12 maret 1947. Inventarisatie no.1992

#### **Sumber-Sumber Arsip Yang Diterbitkan:**

Bijblad op het Staatsblad van Oost Indonesie ,1947.

Boschwezen in Nederlansch- Indie, *Buitengewesten- Congresnummer 1937 Prae-Adviezen Voordrachten en Debaah*. Archipel, Drukkerij Buitenzorg. 1937

Departement van Economische Zaken, 1937. *Nederlandsch Indischen Export van Copra Handel en Palmolie*. Samengesteld op het Bureau voor Uitvoorzaken van het Kantoor voor den Handel

Departement van Economische Zaken, 1940. *Bureau Voor Buitenlandsche Handelsvoorlichting*. Batavia: Kantoor voor Handel Mail Bericht, 1940

Dokumentasi dan Penerangan Kementerian *Warta Berita Ekonomi Indonesia Timur*. 1949  
*Jaarverslag van de Handelsvereniging Makassar*, 1905-1940.  
 Stukken Betreffende *Algemene Handelspolitieke Maatregelen, Handels Boycot en Smokkelarij of Singapura* 1947.  
*Stukken Betreffende Financiering van de Import Handels*, 1947-1949.  
*Stukken Zake de Bevordering der Economische Betrekking met het Buitenland*, 1947-1948  
*Stukken Betreffende de Rijstpositie van Indonesie*, 1948-1949  
 The Economic Review of Indonesia 1947, *Ministry of Economic Affairs*, Vol .1  
 The Economic Review of Indonesia. Batavia-Java: *Department of Economic Affairs*, vol. I. No.I.

#### **Surat Kabar:**

*Harian Makassar 30 Juni 1956*  
*Harian Makassar 15 Nopember 1956*  
*Kebangunan*, 25 Agustus 1937  
*Pemandangan*, 15 Juli 1937  
*Pemberitaan Makassar 1914-1941 (mikrofilm)*  
*Pedoman Rakyat 7 Januari 1956*  
*Pedoman Rakyat 8 Mei 1956*  
*Pedoman Suara Rakyat Merdeka 27 Januari 1958*  
*Pedoman Suara Rakyat Merdeka 11 Feberuari 1958*  
*Soelawesi bergolak tahun 1957*

#### **Karangan dan Buku:**

Abdul Qahhar Mudzakkar  
 1960 "Presepsi Demokrasi Indonesia" Tanpa Penerbit.  
 A.J.H.W. Kawilarang,  
 1912. *De Kalapper (Cocos Nucivera L.)* Batavia, Departemen van Landbouw, Nijverheid en Handel  
 Allen, G.C. and A.G Donninthorne  
 1954 *Western Enterprise in Indonesia and Malaya*. London: Allen & Unwin.  
 Almanak Tani  
 1940 "Oeroesan Copra oleh Dagang-Tengah", Vereniging tot bevordering van den Lanbouw in de Minahasa in Menado  
 Andriani, Gunning M.  
 1919 "De Bevolking van Celebes, door N. M.iii Indie G.W.II  
 Abd. Rasyid Asba  
 1996 "Produksi dan Kebijakan Ekspor Kopra Makassar 1927-1958". Jakarta: Tesis Universitas Indonesia  
 1997 "Pemanfaatan Potensi Alam dan Masyarakat Bajo Dalam Pembinaan Wisata Bahari di Pesisir Teluk Bone". Penelitian Dasar Direktorat Pendidikan Tinggi Dep. Pendidikan dan Kebudayaan RI.  
 1999. "Kota Dagang Makassar Sebagai Jalur Sutra". Direktorat

Sejarah dan Nilai Tradisional Dep P dan K.

- A.B. Lopian 1984, "Perebutan Samudra: Laut Sulawesi Pada abad XVI dan XVII, Prisma, 11
- 1987 "Orang Laut- Bajak Laut – Raja Laut Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad ke XIX" Disertasi Doktor Universitas Gajah Mada Yogyakarta.
- 1992 " Sejarah Nusantara Sejarah Bahari", Pidato Pengukuhan Guru Besar Luar Biasa Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
- 1994 " Bacan and early History of North Maluku, dalam L.E. Visser, Halmahera and Beyond. Social Science Research in The Moluccas", Leiden: KITLV Press.
- Bacon L.C. & F.C Schloemer  
1940. *World Trade in Agricultural Products, its Growth, its Crisis and the New Trade Politic* (Rome: Inter National Institute of Agriculture)
- Basyaib, Hamid, Penerjemah  
1992. *Kemelut Demokrasi Liberal* Surat-Surat Rahasia Boyd Compton, Jakarta: LP3ES
- Bertling, C.T.  
1928 "Chineesche Coprahandel in Minahassa en de Sangir-en Talaud Eilanden" *De Locomotief* . 77 .
- Boeke.J.H  
1953. *Economics and Economic Policy of Dual Societies*, Haarlem: H.D Tjeenk Willink.
- 1983 *Prakapitalisme di Asia*. Jakarta: Sinar Harapan
- Boer, M.G. de & Westermann J.C.  
1941 *Een halve Eeuw 1891-1941*, (Amsterdam: De Bussy)
- Boomgaard. P  
1989 *Changing Economy in Indonesia: A Selection A Statistical Sources Material from the Early 19th Century up to 1940* Royal Tropical Institute, Amsterdam,
- Booth, Anne; O Malley W.J & Weidemann . A, Peny  
1988 *Sejarah Ekonomi Indonesia*, Jakarta: LP3ES.
- Broeder, J.H.R.  
1933 "Kwaliteitverbetering van Copra in Noord Celebes" dalam *Economisch Weekblad voor Nederlands-Indie*, 2
- Britis, John  
1954 *Raffles and British Policy in the Indian Arcipelago* dalam *JMBRAS*, Vol. XXVII no1 hal 84-119
- Broersma, R.  
1925 "De Uitvoerhandel van Makassar" dalam *Tijdschrift voor Economische Geographie*
- 1931 "Gorontalo een handelscentrum van Noord Selebes" *Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap* 48: 221-238
- 1932 " De beteekenis van Celebes Ooustkust voor den Handel *Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap* 48: 1039-1049
- 1934 "Koopvaardij in de Molukken" (Groningen: Noordhof) reprint *Koloniaal Tijdschrift* 19 (1930) 26-38
- Buchholt, Helmu

- 1990, *Kirche, Kopra, Burokraten Gesellschaftliche Entwicklung und strategisches Handeln in Nord Sulawesi Indonesia* Verlag Breitenbach Publishers.
- Buchter, J ed.  
1993 *The Rise and Fall of Revenue Farming: Business elites and the Emergence of the Modern State in Southeast Asia*. London: Macmillan.
- Burger, D.H.  
1967 *Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia*. Jakarta: Pradnjaparamita.
- Burke ,Peter  
1990 *The French Historical Revolution the Annales School 1929-1989*, Cambridge: Polity Press.
- Campo, J.N.F.M.a  
1992 " De Koninklijke Paketvaart Maatschappij. Stoomvaart en Staatsvorming in de Indonesische Archipel 1888-1914, Hilversum: Verloren
- Cator, W.J.  
1936. *The Economic Position of the Chinese in the Nederlands Indie* O,Chabot, H.Th. Verwantschap, Stand en Sexe in Zuid Celebes, (Groningen: Jakarta: Wolters)
- C Cense, A.A.  
1979 *Makassars- Nederlands Woordenboek*, (s-Gravenhage: Martinus Nijhoff)
- Celebes Problemen  
1929 "Overdruk eener serie Artiklen u het Soerabaisch handelsblad"
- Chabot, H.Th.  
1979 *Verwantschap, Stand en Sexe in Zuid Celebes*, ( Groningen: Jakarta: Wolters)  
1992 *History & Sosial Teory*. Cambridge: Polity Press
- Chan Kwok Bun  
1998 *State, Economy and Culture Reflections the Chinese Bussiness Networks*. Abell & Micigan Howel Company
- Chaudhuri. K.N  
1985 *Trade and Civilisation in the Indian Ocean: An Economic History From the Rise of Islam to 1750*. Cambridge: University Press.
- Clemens, A.H.P & Lindblad J.Th.  
1989 *Het Belang van de Buitengewesten Economische Expansie en Koloniale Staatsvorming in de Buitengewesten van Nederlands Indie. 1870-1942*, Amsterdam: Neha.
- Cornelius  
1973 " *Tropical Science, Tropical Products Institute*", London: Vol.15 No. 1  
1966 *The Natural History of Palms*, ( London: Weidenfeld & Nicolson
- Creutzberg, P.  
1979 *Expenditure on Fixed Assest ( Changing Economy in Indonesia,vol.3)*. The Hague: Nijhoff, 1979
- Creutzberg, Pieter dan J.T.M. Van Laanen  
1987 *Sejarah Statistik Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Daeng Malewa, Nadjamoedin  
1947 "Politik Manifest Kabinet Nadjamoedin", Pidato Pada Sidang Pertama Parlement Indonesia Timur
- De Gregory, Thomas R & Pi-Sunyer Oriol

- 1969 *Economic Development The Cultural Context*, New York: John Wiley & Sons, Inc.
- De Groot, J.H.C.
- 1941 "Eenige Beschouwingen over de Copracontracten Ordonantie" *Koloniale Studien* No.28
- De Prauwvaart in de 19 de Eeuw dalam *Koloniale Studien*, 1938
- Dick, H W.
- 1975 "Perahu Shipping in Eastern Indonesia". *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 23,1 104-121
- 1989 *Industri Pelayaran Indonesia: Kompetisi dan Regulasi*, Jakarta: LP3ES
- 1989 *The Indonesian Interisland Shipping Industry ; An Analysis of Competition and Regulation* . Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1987
- 1990 "Interisland Trade, Economic Integration, and Emergence of National Economy" didalam Anne Booth, W.J.O. Malley, dan Anna Widemann (ed). *Indonesian Economy History in the Dutch Colonial Era*. New Haven
- 1993 "Indonesian Economic History Inside Out, Review of Indonesian and Malaysian Affairs" (RIMA). Vol 27.
- 1996 "The Emergence of National Economy, 1830-1990" di dalam *Historical Foundations of National Economy in Indonesia, 1890s-1990s* Amsterdam. Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Verhandelingen, Afs. Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 167
- 1999 "Two Archipelagoes: Cores, Peripheries and Inyterisland Shipping in Indonesia and the Philippines, 19 th-20th Centuries" paper, the First International Conference on Indonesian Maritime History: the Java sea Region in an Age of Transition 1870-1970. Semarang 1-4 Desember.
- Djojohadikusumo, Sumitro
- 1994 *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES. 1994 Cet. Kedua.
- Dol, J.
- 1949 " Copra en Coprafonds in Oost -Indonesie" *Landbouw* 21.85-102.
- Furnivaal, J.S.
- 1939 *Nederlands India: A Study of Plural Economy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- G. Alting Du Cloux .
- Gegevens Export Copra en Palmolie
- 1937 *Gegevens Betreffende den Nederlandsch Indischen export van Copra en Palmolie.*, ( Departement van Economische Zaken)
- Gonggong, Anhar
- 1992 *Abdul Qahhar Mudzakkar Dari Patriot Hingga Pemberontak*, Jakarta: Grasindo.
- Groot, J.H.C.de
1941. " Eenige Beschouwingen over Copracontracten -Ordonanties" *Koloniale Studien* 25 97-111,
- Harvey , Barbara Sillars
- 1984, *Permesta, Pemberontakan Setengah Hati* Jakarta: Grafiti Press.

Heersink, Christiaan.G

1995, "The Green Gold of Selayar A Socio Economic History of an Indonesia Coconut Island C. 1600 –1950: Perspectives from a Periphery" Academisch Proefschrift ter Verkrijging van de Graad van Doctor Aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Higgins, Benyamin. 1957 *Indonesia's Economic Stabilization and Development* New York: Institute of Pacific Relation

Hunger, F.W.T.

1916 " Cocos Nucifera: Handboek voor de Kennis van den Cococs Palm in Nederlandsch-Indie, Zijn Geschiedenis, Beschrijving, Cultuur, en Producten, Amsterdam: Scheltema & Hlpkema' s Boekhandel.

-----1938 "De Paruw in De Wetgeving en In Het Adatrecht" dalam Koloniale Studien.

John O. Sutter.

1959. "Indonesianisasi Politics a Changing Economy, 1940-1950 Volume II. The Indonesian Economi During The Revolution" Department of Far Eastn Stdies Cornell University, Itaca New York Jilid.II

John O. Sutter.

1959. "Indonesianisasi Politics a Changing Economy, 1940-1950 Volume III. Sovereign Indonesia Strivers for a National Economy " Department of Far Eastn Stdies Cornell University, Itaca New York Jilid.II

John O. Sutter. 1959. "Indonesianisasi Politics a Changing Economy, 1940-1950 Volume II. Southeast Asia Program, Volume IV. Sovereign Indonesia Strivers for a National Economy: Political Attitudes Towards the Economy, Foreign Investment and Nationalization " Department of Far Eastn Stdies Cornell University, Itaca New York Jilid.II

Kahin, Audrey R

1990, *Pergolakan Daerah pada awal Kemerdekaan*. Jakarta: Grafiti.

Kahin, George Mc.Turnan

1995, *Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik Nasionalisme dan Revolusi Indonesia* Jakarta: Universitas Sebelas Maret Press

Kamerling, R.N.J.

1982. De. N.V. Oliefabrieken Insulinde in Nederlands-Indie.Bedrijfsvoering in de verte, (Franeker wever)

Kementrian Penerangan RI.

1953. Peringatan 125 Tahun Berdirinya De Javasche Bank 182-1953

Knaap,Gerrit J. Ed

1989. *Changing Economy in Indonesia, Vol. 9 Transport 1819-1949*. Amsterdam: Royal Tropical Institute.

Leirissa. R.Z.

1991 *PRRI Permesta Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis* Jakarta: Grafiti .

1993 "The Structure of Bugis Makassar Trade in pre-modern Maluku" Dalam Review of Indonesia and Malaysian Affairs, Vol.27 No.1 dan 2

1994. The Copracontracten "An Indication of Economic Development in Minahasa During the Late Colonial Period" Koninklijke Nederlandsche Academie van Wetenschappen , Amsterdam
- Leur, J.C. van  
1955 *Indonesia Trade and Society, Essay in Asia Social and Economy History*, The Hague,W.van Hoeve Publishers Ltd.
- Lindblad, J.Th  
1988. "Computer Application in Expansion History" : Survei . Leiden Centre for The History of European Expansion.  
1989 "*Economic Growth in the Outer Island, 1919-1940*", Holland:New Challenge  
1989 *Het Belang van de Buitengewesten: Economische Expansie en Koloniale Staatsvorming in de Buitengewesten van Nederlands- Indie, 1870-1942*. Amsterdam: Neha  
1993, *New Challenges in the Modern Economic History of Indonesia*. Leiden: Programme of Indonesian Studies.  
1996 *Historical Foundations of a National Economy in Indonesia, 1890-1990*, Amsterdam : North Holland,  
2000 *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia Berbagai Tantangan Baru Jakarta: LP3ES*  
2002 S. Nawianto, Penerjemah, 2002. *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Studi Sosial Asia tenggara UGM kerjasama Pustaka Pelajar
- Lloyd, Christopher  
1986 *Explanation in Social History* Blackwell: Cambridge University Press.  
1993 *The Structures of History*. Blackwell: Cambridge University Press.
- Maddison, Angus dan G Prince, ed  
1989 *Economic Growth in Indonesia ,1820-1940* Dordrecht – Holland : Foris Publications
- Meyer , G.  
1970 *Das Eindringen des Deutschen Kapitalismus in die Niederlandischen and Britischen Kolonien in Sudostasien von den Anfängen bis 1918*. Berlin Humboldt Universitat, 1970
- Michael, C. Howard  
1986 *Ethnicity and Nation-Building in the Pacific. The United Nations University*
- Michael Southon  
1995 *The Navel of the Perahu: Meaning and Values in the Maritime Trading Economy of a Butonese Village*.Cambera: A Publication of the Departement of Antropology Research School of Pasific and Asian Studies The Australian National University
- Myint, M.  
1971 *Economic Theory and the Underdevelopped Countries*. New York:London Oxford University Press
- Mubiyarto  
1988 *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*. Jakarta LP3ES
- Millar, S.B

- 1989 *Bugis Weddings: Rituals of Social Locations in Modern Indonesia*. Berkeley: Center for South and Southeast Asia Studies University of California
- Nave, Th. A. De.  
1913 "De Klappercultuur op de Westkust van Borneo" *Indische Mercur* 971-974.
- North, Douglass C  
1990 *Institutions Institutional Change and Economic Performance* Cambridge: University Press.
- Oeconomische Berichten  
1913. "Tropisch Nederlands Maandblad Uitgegeven der Groep Nederlands Verbond", Weltevreden: Boekhandel Visser & Co
- O. Malley, William Joseph  
1977 "Indonesia in the Great Depression East Sumatra and Yogyakarta in the 1930s" Tesis Doktor of Philosophy . Cornell University.
- Poelinggomang, Edward. L.  
1991, "Proteksi dan Perdagangan Bebas Kajian Tentang Perdagangan Makassar Pada Abad ke 19". Academisch Proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam
- Poerwanto Bambang  
1992 "From Dusun to Markt: Native Rubber Cultivation in Southeast Sumatra, 1890-1940". Dissertation at the School of Oriental and African Studies.
- Post, Peter  
1991 *"Japanese Bedrijvigheid in Indonesia, 1868-1942. Structurele Elementen van Japan's Economische Expansie in Zuidoost Azië"*. Academisch Proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam
1993. "Japan and The Integration of the Nederlands East Indies in to world Economy, 1868-1942", dalam *Review of Indonesian and Malaysian Affairs* 27. 1993.
- 1995 "Chinese Business Network and Japanese capital in Southeast Asia –1880-1942. Some preliminary observations" dalam: R. Brown, ed. *Chinese Business Enterprise in Asia*. London: Routledge
- Poeze, Harry A & Pim Schoorl  
1991 *Excursions in Celebes*. Leiden: KILTV.
- Prince, Ge & Maddison, Angus, ed.  
1989 *Economic Growth in Indonesia, 1820-1940*. : Foris Publications Holland.
- Reid, Anthony  
1983 "The Rise of Makassar" *Review of Indonesian and Malaysian Affairs (RIMA)* vol. XVII, 1983
- 1988 *Southeast Asian the Age of Commerce, Vol.I: the Land Below the Winds* New Haven & London: Yale University Press
- Sanusi, Achmad.  
1963 "The Dynamics of Nationalization of Dutch-Owned Enterprises in Indonesia. A. Political, legal, Economic Developmental and Administrative Analysis". Submitted in Partial Fulfilment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in the Departement of Government Indiana University
- Sievers, Allen.M  
1987 *The Mystical World of Indonesia Culture & Economic Development in Conflict* Baltimore and London: Hopkins University Press.
- Stoler.A.L.

1985. *Capitalism and Confrontations in Sumatra's Plantation Belt, 1870-1979* (New haven: Yale University Press. 1985
- Sutherland H.A.
- 1980 "Pitilal structure and Kolonial Control in South Sulawesi", dalam: Schefold R. J.W. Schoorl, dan J. Tennekes, ed. *Man, Meaning and History Essays in Honour of H.G. Schulte Nordholt* , The Hague: Martinus Nijhoof VKI No.89
1993. "Slavery and Slave Trade in South Sulawesi, 1660-1800,s" dalam: Anthony Reid, ed, *Slavery, Bondage, and Dependency in Southeast Asia*, St. Lucia: University of Queensland Press.
- 1987 " Tripang and Wangkang. The China Trade of Eighteenth Century Makassar 1720-1820." a Paper presented to the KITLV Workshop Trade, Society and Belief in South Sulawesi and its Maritime World. Leiden KITLV
1989. "Eastern Emporium and Company Town: Trade and Society in Eighteenth Century Makassar" , Dalam: Frank Broeze (ed), *Brides of the Sea: Port Cities of Asia From The 16<sup>th</sup>-20<sup>th</sup>*

---

Thee. Kian Wie

1977. "Plantation Agriculture and Esport Growth: An Economic History of East Sumatra, 1863-1942". Jakarta: LEKNAS-LIPI

-----

1994. *Eksplorasi in Indonesia Economic History*. Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Touwen Jeroen,

2001. *Estremes in the Archipelago Trade and Economic development in the Outer Island of Indonesia 1900-1942*, Leiden KITLV. Press

Tulus T.H. Tambunan,

- 1991 Politicoeconomic History Of Indonesia: A Short Analitical Descriptions: 1949-1950*. Erasmus University Rotterdam

Van den Brink.

Villiers,J.

1990. "Makassar: The Rise and Fall of an East Indonesian Maritime Trading State 1512-1669" in: J. Kathirithambi-Wells & J. Villiers (ed.) *the Southest Asian Port and Polity: Rise and Demise* Singapore: Singapore U.P.hal. 143-159

V.Jesudarson, James

- 1989 *Etnicity and the Economy the State, Chinese Business, and Multinationals in Malaysia*. Singapore, New York Oxford University Press.

Yoon Hwan Shin,

- 1989 "Demistifying the Capitalist State: Political Patronage, Bureaucratic Interests, and Capitalists- in Formation in Soeharto' s Indonesia" Dissertation Yale University. 1989.